



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



Jl. Imam Bonjol No. 4A Pariaman Telp. (0751) 92202, 91012
Fax. (0751) 91012 www.pariamankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subbahanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 merupakan laporan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 -2023 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap Kepala Daerah wajib menyusun laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban dari amanah yang diemban Pemerintah Daerah sebagai pengguna sumberdaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta menginformasikannya terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, perbaikan yang terus menerus akan terus Kami lakukan seperti pengembangan dan mensinkronkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja dan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja dan manajemen kinerja dimasa yang akan datang.

Pasca Pandemi Covid-19 masih memberi dampak terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat juga terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga banyak indikator yang belum sesuai dan mencapai target yang

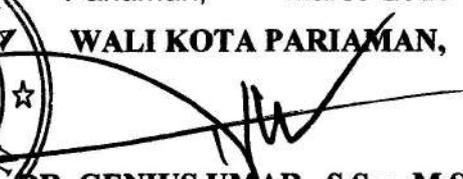
diharapkan. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, manajemen maupun keuangannya.

Kami juga mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman dimasa yang akan datang.



Pariaman, Maret 2023

WALI KOTA PARIAMAN,


DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, dimana Visi Pembangunan Kota Pariaman adalah “

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Visi tersebut diwujudkan melalui beragam misi, kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan di capai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja Tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.

Untuk mewujudkan misi yang diemban, Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 telah menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari 19 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 23 Indikator Kinerja.

Adapun rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 meliputi :

Misi1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian 52%.

Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 100,1 %;

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 99,70%;

Sasaran 3 : Menurunnya Prevelensi Stunting dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 146 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata-rata sebesar 97%.

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

Sasaran 1 : Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 94%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 90%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 91,8%.

Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 94%;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 365%;

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 89%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Mitigasi Bencana didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 123%.

Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebesar 100,1%.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 97%.
- Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 39%.
- Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kemiskinan didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 99%.
- Sasaran 5 : Menurunnya Angka Pengangguran dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 104 %.
- Sasaran 6 : Meningkatnya Kemandirian Desa dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 100,44 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Kota Pariaman	5
1.4 Analisis Isu-Isu Startegis	10
1.5 Sistematika Penulisan	43
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	44
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023	44
a. Visi	44
b. Misi	46
c. Tujuan dan Sasaran	51
2.2 Indikator Kinerja Utama	69
2.3 Perjanjian Kinerja	70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	79
3.1 Pengukuran Kinerja	79
3.2 Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	79
a. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022	81
b. Analisis Capaian Kinerja 2022	84
3.3 Akuntabilitas Keuangan	174
BAB IV PENUTUP	182
PENGHARGAAN-PENGHARGAAN	185

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2022
Tabel 1.3	Kondisi Topografi Kota Pariaman
Tabel 1.4	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan
Tabel 1.5	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021
Tabel 1.7	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2017-2021
Tabel 1.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2021
Tabel 1.9	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021
Tabel 1.10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021
Tabel 1.11	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021
Tabel 1.12	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rp/Org/Tahun)
Tabel 1.13	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017-2021
Tabel 1.14	Ketercapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Pariaman
Tabel 1.15	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar
Tabel 1.16	Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
Tabel 2.1	Keselarasan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
Tabel 2.2	Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026, RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 1
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 2
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 3
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 4
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Misi 5
Tabel 2.8	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel 3.1	Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman Dari Tahun 2018-2022
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023

Tabel 3. 3	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat
Tabel 3.4	Data Perguruan Tinggi dan Mahasiswa SAGA SAJA tahun 2018-2022
Tabel 3.5	Data Mahasiswa SAGA SAJA yang sudah tamat dan bekerja
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.7	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019-2022
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.9	Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.10	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019-2022
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.12	Perbandingan Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.13	Indeks Profesionalitas ASN beberapa Kabupaten Kota di Sumatera
Tabel 3.14	Jumlah dan Jenjang Pendidikan PNS Tahun 2022
Tabel 3.15	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan /Eselon
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 17	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2022
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.19	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap
Tabel 3. 20	Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik
Tabel 3. 21	Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Saluran
Tabel 3. 22	Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi
Tabel 3. 23	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 24	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 2019
Tabel 3. 25	Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2020
Tabel 3. 26	Nama Lokasi Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022
Tabel 3. 27	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pariaman Tahun 2019-2022
Tabel 3. 28	Capaian Variabel Pembentuk Indikator Perumahan Permukiman Layak Huni

Tabel 3. 29	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Tabel 3. 30	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 31	Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 32	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 33	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 34	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 35	Data Produksi Pertanian Tahun 2020-2022
Tabel 3. 36	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 37	Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2018-2022
Tabel 3. 38	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2019-2023
Tabel 3. 39	Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman Tahun 2019-2022
Tabel 3. 40	Persentase Penurunan Kemiskinan di Sumatera Barat Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2019-2022
Tabel 3. 41	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2019-2022
Tabel 3. 42	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3. 43	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2022
Tabel 3. 44	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2019-2023
Tabel 3. 45	Nama –nama dan Status Desa Tahun 2021- 2022
Tabel 3. 46	Status Desa di Kota Pariaman pada tahun 2020 -2022
Tabel 3. 47	Data Komposit Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman Tahun 2019-2022
Tabel 3. 48	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya kemandirian Desa dengan target akhir RPJMD 2018-2023

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kota Pariaman
Gambar 1.2	Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan

	Daerah Kota Pariaman
Gambar 1.3	Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJMN 2005-2025
Gambar 1.4	Nawacita kedua RPJMN 2020-2024
Gambar 1.4	5 Arahkan Utama Presiden

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Trend Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022
Grafik 3.2	Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2019 -2022
Grafik 3.3	Angka Kematian Bayi di Kota Pariaman Tahun 2019-2022
Grafik 3.4	Umur Harapan Hidup Penduduk Indonesia 2012-2022
Grafik 3.5	Balita Stunting Tahun 2018 – 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan setiap tahun. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya keuangan. Laporan Kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya yang didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis, dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah (Dr. GENIUS UMAR, M.Si dan Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM) yang dituangkan kedalam visi, misi dan program



strategis RPJMD Kota Pariaman 2018-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun Kedua dari RPJMD Kota Pariaman. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Pariaman, pada arah Visi dan Misi Kota Pariaman. RPJMD Kota Pariaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, maka pengukuran akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat digambarkan dan pertanggungjawabkan secara lebih tepat. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan di Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, disamping itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pariaman. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang



tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, yang terdiri dari :

A. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

1. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

B. Sekretaris Daerah membawahi 2 Asisten yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

B. SEKRETARIAT DPRD

C. INSPEKTORAT



D. DINAS

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, dan Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

E. BADAN

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. KANTOR

1. Kantor Kesbangpol & Linmas
2. Kecamatan.



1.3. Gambaran Umum Kota Pariaman

❖ Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar $73,36 \text{ Km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan 6 buah pulau-pulau kecil yaitu : Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar $73,36 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $282,56 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$ yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah(Km ²)
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2020



Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan 16 Kelurahan 55 desa dengan jumlah penduduk sampai bulan Juni Tahun 2020 berjumlah 91.942 jiwa penduduk yang tersebar di 4 kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2018– 2022

No	Kecamatan						% Penduduk/ Kec
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pariaman Tengah	31.413	31.690	31.947	32.349	33.183	33,62
2	Pariaman Utara	22.887	23.314	23.280	23.754	24.612	24,94
3	Pariaman Selatan	19.398	19.899	19.992	20.219	20.844	21,12
4	Pariaman Timur	18.244	18.871	19.140	19.318	20.051	20,32
	KOTA PARIAMAN	91.942	93.774	94.359	95.640	98.690	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Capil

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2018 - 2022 terus meningkat, dan terjadi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Pd. Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Pd. Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Pariaman



❖ Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 6 buah pulau-pulau kecil yaitu Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Tabel 1.3
Kondisi Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Topografi	Pariaman Utara	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Jumlah (Ha)
1	Datar - (0-2%)	2.479	2.313	1.994	6.786
2	Bergelombang - (3-15%)	0	64	120	184
3	Curam - (16-40%)	366	0	0	366
4	Sangat Curam - (>40%)	0	0	0	0
Jumlah (ha)		2.845	2.377	2.114	7.336

Sumber : Profil Kota Pariaman



Seperti pada umumnya daerah lain, Kota Pariaman yang berada di bagian Pantai Barat Pulau Sumatera, memiliki jenis batuan resen dan tuna vulkan. Kondisi tanah relatif subur dan sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kegiatan pertanian. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Folkal Datar.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai angka sekitar 336 mm, dengan lama hari hujan 199 hari. Suhu rata-rata 25,14°Celsius, dengan kelembaban udara rata-rata 86,57% dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berhawa cukup panas, hal ini disebabkan karena secara geomorfologi wilayah Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 12,00 Km dan ketinggian rata-rata 0-15 M dpl, sehingga suhu rata-rata pada siang hari cukup panas dan kelembaban yang cukup tinggi.

Tabel 1.4
Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40
Kota Pariaman	0 - 15	12,00

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2022

Ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer, yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan



penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai. Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yang tersebar di empat kecamatan Kota Pariaman, seperti Tabel

Tabel 1.5
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman

Jenis Tanah	Luas (km ²)
Glaisol Distrik	1,335
Latosol Kronik	835
Andosol Humik	50
Volkan Datar	2,507
pasir pantai	826
glaisol autrik	1,254

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian utara.
- Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah
- Satuan tanah Tropopsamments, Tropaquents dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.



1.4. Analisis Isu-Isu Strategis

Pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah. Dengan pembangunan yang berkualitas diharapkan masyarakat akan merasakan dampaknya sehingga akan memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat.

1.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kota Pariaman menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut :

1) Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Permasalahan pembangunan ekonomi Kota Pariaman tergambar dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Walaupun pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,59 % . Dan pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,30 %, Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sebesar -1,32 % akibat pandemi covid-19. Dan pertumbuhan yang minus ini hampir dialami oleh semua daerah di Indonesia. Memang secara data



BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yang cenderung melambat, Hal yang sama juga dialami oleh provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berada pada nomor urut ke-3 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dianggap sebagai suatu permasalahan makro daerah Kota Pariaman yang harus secara bertahap bisa diatasi.

Tabel 1.6

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021**

Wilayah	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	5,05	-1,60	3,29
Kabupaten :			
Kepulauan Mentawai	4,76	-1,85	2,89
Pesisir Selatan	4,81	-1,11	3,37
Kab.Solok	5,07	1,12	3,32
Sijunjung	4,83	-1,10	3,15
Tanah Datar	5,01	-1,13	3,30
Padang Pariaman	2,51	-10,46	2,18
Agam	4,81	-1,38	3,70
Lima Puluh Kota	5,10	-1,16	3,33
Pasaman	4,84	-0,87	3,39
Solok Selatan	4,89	-1,24	3,35
Dharmasraya	4,98	-1,39	3,42
Pasaman Barat	4,49	-1,34	3,75
Kota :			
Padang	5,65	-1,86	3,66
Kota Solok	5,49	-1,42	3,32
Sawah Lunto	5,49	-1,27	2,49
Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46
Bukittinggi	5,84	-1,74	3,61
Payakumbuh	5,89	-1,66	3,58
Pariaman	5,30	-1,32	3,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat



Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama Tahun 2022 tercatat 4,55 persen. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 3.669.62 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 3.836.54 juta rupiah pada tahun 2022.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2022 tercatat 5.881.85 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2021 tercatat 5.258.657,03 juta rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2021 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,93 persen, kedua kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,42 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,90 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,21 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pariaman pada tahun 2021 sebesar 3,53% berada pada urutan ke tujuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.7
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Atas
 Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Jiwa)
 Tahun 2017-2021**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	49,75	42,80	45,21	44,03	45,29
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	45,12	47,06	50,44	49,46	54,80
Pesisir Selatan	26,39	28,32	30,25	29,96	29,29
Kab.Solok	31,96	34,10	36,36	35,96	35,72
Sijunjung	34,45	36,31	38,46	37,87	40,31
Tanah Datar	32,97	35,13	37,58	37,34	36,31
Padang Pariaman	46,32	49,45	51,14	42,95	42,62
Agam	36,83	39,24	41,80	41,19	39,96
Lima Puluh Kota	35,98	38,27	40,79	40,24	41,99
Pasaman	28,30	29,87	31,66	31,32	31,12
Solok Selatan	29,55	30,97	32,57	31,81	31,26
Dharmasraya	38,45	40,14	41,78	40,41	46,52
Pasaman Barat	32,06	33,52	34,69	33,75	36,51
Kota :					
Padang	57,27	61,24	65,65	64,67	71,36
Kota Solok	50,57	53,43	57,00	56,05	57,10
Sawah Lunto	51,55	55,00	58,85	58,02	58,62
Padang Panjang	56,74	60,35	64,72	63,82	64,09
Bukittinggi	58,78	62,21	66,49	65,00	74,24
Payakumbuh	42,78	45,88	50,34	49,63	51,64
Pariaman	49,75	52,68	56,56	55,86	55,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Adapun permasalahan Pembangunan Ekonomi disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian ;
2. Masih belum optimalnya; serta
3. nilai investasi Produktivitas sektor pariwisata masih rendah

2) Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia Kota Pariaman selama 2018-2021 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia. Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2018-2021, pembangunan manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 76,26 dan pada tahun 2019 capaian IPM



meningkat menjadi 76,70. pada tahun 2020 sebesar 76,90, serta tahun 2021 sebesar 77,07. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 72,38 tahun 2020 dan IPM Nasional yang sebesar 71,94 ditahun 2020. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 1,72 selama periode tersebut. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota lain di provinsi Sumatera Barat, dari 19 Kabupaten/Kota capaian IPM Kota Pariaman berada pada rangking ke-6. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2021

Wilayah	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	71,73	72,39	72,38	72,65
Kabupaten :				
Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35
Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	70,03
Kab.Solok	68,60	69,08	69,08	69,24
Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86
Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46
Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76
Agam	71,70	72,37	72,46	72,57
Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68
Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77
Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23
Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76
Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76
Kota :				
Padang	82,52	82,68	82,82	82,9
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41
Sawah Lunto	71,72	72,39	72,64	72,88
Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97
Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,7
Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08
Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia



Permasalahannya akan lebih terlihat pada komponen pembentuk IPM meliputi :

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah,
- 2) Angka Rata-Rata Lama sekolah,
- 3) Umur Harapan Hdup (UHH), dan,
- 4) Daya Beli Masyarakat.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.9 dan Tabel 1.10 capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 capaian Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,51 dan menjadi 14,55 pada tahun 2021. Sementara itu capaian pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 sebesar 10,10 dan menjadi 10,67 pada Tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian Angka Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman masih kalah dari Kota Padang Panjang dan Kota Bukittnggi. Sedangkan untuk capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke-6 dari 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.9
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	12,07	12,39	12,76	12,82	12,89
Pesisir Selatan	13,06	13,30	13,31	13,32	13,33
Kab.Solok	13,01	13,02	13,03	13,04	13,05
Sijunjung	12,34	12,35	12,36	12,37	12,38
Tanah Datar	13,59	13,88	14,32	14,33	14,34
Padang Pariaman	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68
Agam	13,94	13,85	13,86	13,87	13,88
Lima Puluh Kota	13,26	13,27	13,28	13,29	13,3
Pasaman	12,72	12,78	12,79	12,80	12,81
Solok Selatan	12,68	12,69	12,70	12,71	12,72
Dharmasraya	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44
Pasaman Barat	13,06	13,22	13,40	13,61	13,68
Kota :					
Padang	16,15	16,50	16,51	16,52	16,53
Kota Solok	14,29	14,30	14,31	14,32	14,33
Sawah Lunto	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18
Padang Panjang	15,03	15,04	15,05	15,06	15,07
Bukittinggi	14,94	14,95	14,96	14,97	14,98
Payakumbuh	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27
Pariaman	14,51	14,52	14,53	14,54	14,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat



Tabel 1.10
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 202017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20
Pesisir Selatan	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27
Kab.Solok	7,60	7,84	7,85	7,86	7,87
Sijunjung	7,72	7,77	8,10	8,11	8,12
Tanah Datar	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62
Padang Pariaman	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88
Agam	8,39	8,69	8,85	8,96	8,97
Lima Puluh Kota	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07
Pasaman	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10
Solok Selatan	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32
Dharmasraya	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55
Pasaman Barat	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27
Kota :					
Padang	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59
Kota Solok	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04
Sawah Lunto	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32
Padang Panjang	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63
Bukittinggi	11,30	11,31	11,32	11,33	11,34
Payakumbuh	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81
Pariaman	10,10	10,36	10,37	10,59	10,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu pada Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 Usia Harapan Hidup Kota Pariaman sebesar 69,63 menjadi sebesar 70,28 Pada Tahun 2020. Namun kondisi ini capaian usia harapan hidup ini masih berada pada nomor urut ke-6 dari 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan. Komponen pertama dalam pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.11
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	64,37	64,49	64,68	64,73	64,73
Pesisir Selatan	70,23	70,45	70,73	70,86	70,96
Kab.Solok	67,65	67,95	68,34	68,58	68,79
Sijunjung	65,44	65,69	66,02	66,21	66,36
Tanah Datar	69,11	69,38	69,73	69,94	70,12
Padang Pariaman	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97
Agam	71,57	71,83	72,17	72,37	72,53
Lima Puluh Kota	69,31	69,47	69,70	69,79	69,84
Pasaman	66,54	66,82	67,18	67,40	67,59
Solok Selatan	66,92	67,21	67,58	67,81	68,01
Dharmasraya	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53
Pasaman Barat	67,15	67,37	67,67	67,82	67,94
Kota :					
Padang	73,20	73,55	73,57	73,65	73,69
Kota Solok	72,92	73,14	73,45	73,61	73,73
Sawah Lunto	69,39	69,59	69,87	70,00	70,1
Padang Panjang	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82
Bukittinggi	73,69	73,91	74,22	74,38	74,5
Payakumbuh	73,13	7,33	73,61	73,74	73,84
Pariaman	69,67	69,87	70,15	70,28	70,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Untuk komponen yang lain dari pembentuk IPM yaitu Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita. Selama dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 12.425,- menjadi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 12.818,-. Kondisi ini sedikit lebih baik karena berada karena pada urutan ke-4 diantara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.12



**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rp/Org/Tahun)**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321
Pesisir Selatan	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270
Kab.Solok	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215
Sijunjung	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389
Tanah Datar	10.331	10.417	10.709	10.588	10.616
Padang Pariaman	10.579	10.919	11.158	10.998	11.050
Agam	9.388	9.489	9.780	9.651	9.662
Lima Puluh Kota	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668
Pasaman	7.882	8.238	8.599	8.425	8.440
Solok Selatan	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367
Dharmasraya	10.851	11.189	11.431	11.273	11.324
Pasaman Barat	8.704	8.979	9.180	9.047	9.089
Kota :					
Padang	13.957	14.312	14.728	14.481	14.540
Kota Solok	11.673	11.968	12.337	12.117	12.168
Sawah Lunto	9.343	9.765	10.238	10.182	10.195
Padang Panjang	10.240	10.440	11.013	10.734	10.754
Bukittinggi	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331
Payakumbuh	12.858	13.114	13.464	13.281	13.317
Pariaman	12.425	12.611	12.958	12.796	12.818

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam bidang Pembangunan Manusia yang berkualitas adalah:

- 1 Kualiras pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah;
 - 2 Kualits kesehatan masyarakat Kota Pariaman masih rendah;
 - 3 Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah.
- 3) Permasalahan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum



didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal. SPIP dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

1 Manajemen Perubahan

Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Pemerintah Kota yang punya visi perubahan yang jelas dalam tatakelola pemerintahan. Beranjak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pariaman saat ini memiliki orientasi budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi problem apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

2 Penguatan Pengawasan

Di sisi lain, pemerintah Kota Pariaman juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya kemampuan dan jumlah personil aparatur pengawas. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman secara menyeluruh. Masalah lain yang muncul terkait dengan hal di atas adalah masalah sistem dokumentasi dan monitoring yang terintegrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dapat dilihat pengelolaan



dokumentasi dan kearsipan yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara elektronik.

3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB tahun 2021, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan belum membaik dan bersifat implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

4 Penguatan Kelembagaan

Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangannya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

5 Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan di pemerintah Kota Pariaman, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.



6 Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM pemerintah Kota Pariaman, masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di pemerintah Kota Pariaman secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, pemerintah Kota Pariaman belum ada diklat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan pegawai.

7 Deregulasi Kebijakan

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak ditemukan problem kelembagaan dan masyarakat yang menyangkut pelayanan diantaranya: Ditemukan adanya keterlambatan pelayanan, menumpuk urusan pelayanan pada satu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), pegawai yang mempersulit pelayanan, rantai birokrasi pelayanan yang masih panjang. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, masing-masing program area perubahan pemerintahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi



- yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
 - Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.
 - Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Pariaman dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
 - Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi di pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan.



Tabel 1.13
Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017-2021

No.	Urain	Tahun					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Nilai Sakip	52,35 (CC)	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,06 (B)	
2.	Indeks RB	-		51,62 (CC)	53,42 (CC)	58,19 (CC)	

Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia

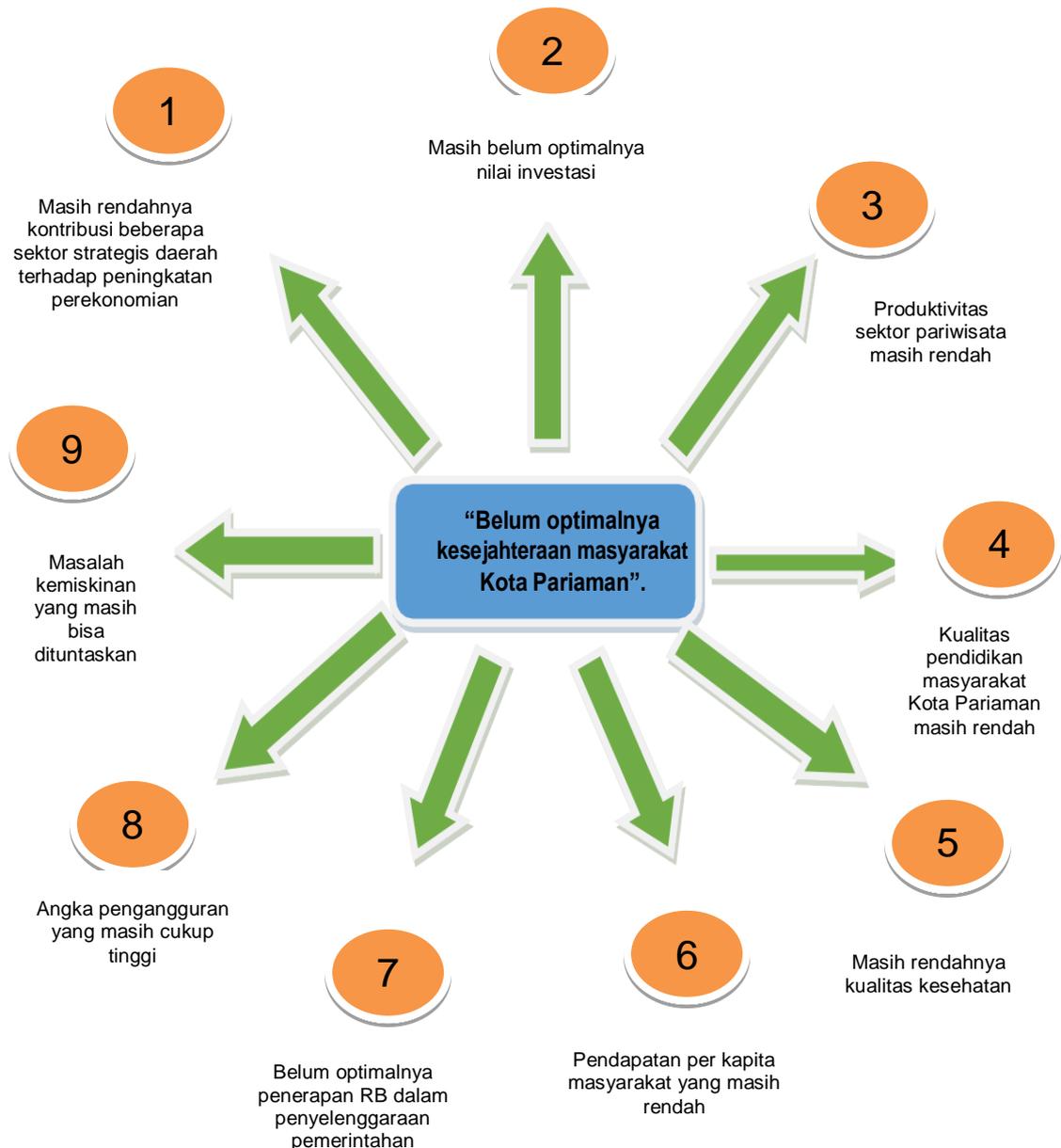
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu:

1. belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik;
2. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang kapabel;

Permasalahan makro pembangunan Kota Pariaman tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1 Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.
- 2 Masih belum optimalnya nilai investasi.
- 3 Produktivitas sektor pariwisata masih rendah.
- 4 Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.
- 5 Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
- 6 Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah
- 7 Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 8 Angka pengangguran yang masih cukup tinggi
- 9 Masalah kemiskinan yang masih bisa dituntaskan

Gambar 1.2
Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman



1.4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu-isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan



tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

- 1) Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektor, Regional, Nasional dan Global
 - a) Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

Melanium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan



kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan .



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan, bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi



acuan Kota Pariaman, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG`s. Berikut merupakan capaian KLHS Kota Pariaman yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s.

Tabel 1.14

Ketercapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	14	9	1	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	3	1	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	29	4	1	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	8	5	0	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	9	4	1	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8	7	1	2
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	0	2
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	8	4	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	2	2	2
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	4	1	1	0
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	20	8	4	0	8
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	0	2	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	13	5	3	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	8	5	2	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

Menurut pilar, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman, bahwa Pilar yang capaian tertinggi adalah pilar sosial (67 indikator dengan kategori SS), pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (22 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi adalah pilar sosial (25 indikator) sedangkan kategori NA tertinggi adalah pilar ekonomi (9 indikator). Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.15



Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Sosial	97	67	25	4	1
2	Ekonomi	55	26	16	9	4
3	Lingkungan	49	20	12	4	13
4	Hukum dan Tata Kelola	21	13	5	3	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

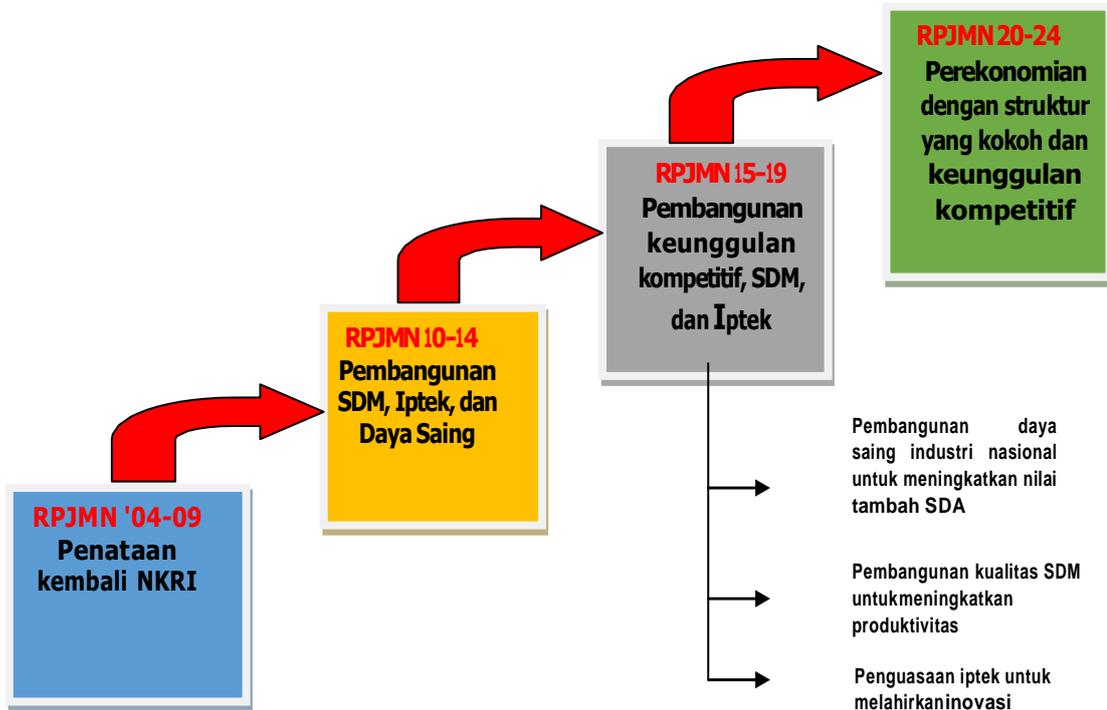
Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2021

b) RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Pariaman pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Pariaman mengikuti periode RPJMN III dan IV. maka arah kebijakan RPJMD Kota Kota Pariaman menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan IV (2019-2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan tahap ke empat (2019-2024).

Gambar 1.3.

Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi



penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan

dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan



pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikedukung terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Pariaman harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- 1 Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- 2 Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- 3 Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- 4 Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

c) RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Gambar 1. 4
Nawacita kedua RPJMN 2020-2024



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 1.5

5 Arahan Utama Presiden



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut :

- 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3 meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

d) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026



Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat



hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem



produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
- 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi
- 3 Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
- 4 Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;
- 5 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital;
- 6 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
- 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 8 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
- 2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
- 3 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
- 4 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 5 Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;



- 6 Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
- 7 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
- 8 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
- 9 Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
- 10 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan Memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menunjang pembangunan berdimensi kewilayahan provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kota Pariaman juga akan memperhatikan pembangunan berdimensi kewilayahan yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Pariaman meliputi :

- 1 Pengembangan Sistem Perkotaan yang menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- 2 Sebagai Kawasan sepadan pantai.



- 3 Sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Dan Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- 4 Sebagai Kawasan pengembangan Kawasan Sentra Industri dengan komoditi : 1) Industri Tekstil dan Produksi Tekstil, 2) Industri Makanan dan Ringan, 3) Industri Pengelohan Hasil Laut dan Perikanan.
- 5 Sebagai Kawasan Pariwisata dengan komoditi : 1) Kawasan yang dikembangkan, 2) Kawasan Pantai Gandorih dan Pulau Angso Duo.

Tabel 1.16

Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

NO	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat RPJMD Tahun 2021-2026	NO	Program Unggulan Kota Pariaman RPJMD Tahun 2018-2023
1	Sumbar Sehat dan Cerdas	1	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
		2	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
		3	Kartu Pariaman Pintar
		4	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
		5	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
		6	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
2	Sumbar Religius dan Berbudaya	1	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
		2	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tk. SD), MDW (tk. SLTP), MDU (tk SLTA)
		3	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
		4	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman
3	Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan	1	Program Pariaman Sejahtera
		2	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
		3	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

e) Isu Regional Provinsi Sumatera Barat

- a. Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) — Pariaman sebagai jalan alternatif dan Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.



f) RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 adalah

“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”.

Rumusan visi tersebut dapat diterjemahkan adanya cita dan citra Kota Pariaman dimasa mendatang untuk menjadi salah satu Kota Perdagangan Dan Jasa yang terletak dipantai Barat Sumatera. Perwujudan Kota Perdagangan Dan Jasa dimaksud utamanya dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani.

Kota Perdagangan merupakan Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.

Kota Jasa.

Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa lainnya.



Wilayah Pesisir Barat Sumatera merupakan Suatu wilayah yang batasan cakupannya meliputi di sepanjang pesisir barat pulau sumatera.

Masyarakat Madani merupakan Masyarakat Madani mengandung arti bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Pariaman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera menuju masyarakat madani maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
- 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
- 3 Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
- 4 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 4 (2018-2023), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 3. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, maka pada RPJM ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.



Berbagai tujuan dan target pencapaian SDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan Kota Pariaman untuk jangka panjang yaitu :

- 1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target :
 - a. Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari.
 - b. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
 - c. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
- 2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target :
 - a. Menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
- 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target :
 - a. Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.
- 4 Menurunkan angka kematian anak dengan target : menurunkan angka kematian balita, bayi dan neonatal.
- 5 Meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua.
- 6 Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target:
 - a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
 - b. Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan.



- c. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar.
- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum Kota Pariaman, analisis isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Pengukuran Kinerja, Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja, capaian dan analisis kinerja Tahun 2022, dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pariaman dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun, pasangan **GENIUS UMAR (Walikota)–MARDISON MAHYUDDIN (Wakil Walikota)** membuat Visi Kota Pariaman tahun 2018-2023 sebagai berikut:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Pariaman dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut mengandung maksud, bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju



dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religius dan berbudaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.

Untuk memahami Visi Pembangunan Kota Pariaman tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Kota Wisata : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan dan Jasa : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang maju dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar

Religius : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

Berbudaya : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan



masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.1
Keselarasan Visi RPJP, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan	" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya"

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasiskan Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;



5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatera

Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan destinasi wisata dan peningkatan pengelolaan wisata yang maju, religious, tertib dan berbudaya dengan cara meningkatkan daya saing pariwisata adalah bagaimana cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah. Kota Pariaman yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam. Semua daya pesona tersebut memberi nilai tambah diiringi dengan usaha minat wisatawan untuk menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Selain itu perlu jaminan wisata yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang tertib.

2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Pariaman. Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, dan berkualitas melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengembangan dan Peningkatan mutu SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas pendidikan yang bermutu tinggi disemua



strata, perkembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender sehingga produktivitas tinggi tersebut mampu memanfaatkan peluang, dapat menghadapi tantangan dan siap mengantisipasi kompetisi global.

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir Yang Modern yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan *waterfront city*, peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dinamis, berwasasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan



keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan perdagangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD, misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi dengan misi RPJMD Perubahan Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026, RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023

RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD KotaPariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.	1	Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya
2	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan	5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal
		5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata				
		4	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil / Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital				



RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD KotaPariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
3	Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan	6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	5	Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pembangunan Daerah	4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
4	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan						
5	Kemajuan budayayang mencerminkan kepribadian bangsa	2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>			2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya
6	Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik	3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasiskan Smart City
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga						
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya						
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan						



c. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai kelima misi pembangunan Kota Pariaman dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan dijelaskan dibawah ini:

1. Dalam rangka pencapaian misi *Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib Dan Berbudaya*, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya sebagai berikut:



Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi I

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Indikator : Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indikator : % Kontribusi Sektor Pawisata Terhadap PAD % Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
	Sasaran		Sasaran
1.	Terwujudnya Daya Saing Wisata Indikator : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata % Pertumbuhan Spending Of Money	1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata. Indikator : 1. % Pertumbuhan Spending Of Money

2. Dalam rangka pencapaian misi *Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berbudaya*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 2

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
	Meningkatnya Kualitas SDM Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Indikator: 1) Angka Harapan Lama Sekolah 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Indikator : 1) Angka Harapan Lama Sekolah 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : 1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 2) Indeks Keluarga Sehat	2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
			Menurunnya prevalensi stunting Indikator : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita



3	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Indikator : Indeks Daya Beli Masyarakat	4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Indikator : Pendapatan/PDRB perkapita
4	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran Indikator : 1) Angka Kemiskinan 2) Angka Pengangguran		
5	Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator : 1) Indeks Desa Membangun		

3. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 3

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi Indikator : Indeks RB	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih Indikator : Indeks RB
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan Indikator : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat 2) Opini WTP BPK Terhadap LKPD 3) Indeks SPBE	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel Indikator : 1) Nilai Sakip 2) Opini WTP BPK Terhadap LKPD
		2	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel Indikator : 1) Indeks SPBE 2) Indeks Profesional ASN
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Pelayanan Publik



4. *Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 4

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana Indikator : % Pencapaian Target SDG's	1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni Indikator : Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator Indeks Infrastruktur Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		3	Meningkatnya Kulitas Perumahan danPermukiman Layak Huni Indikator : Persentase Perumahan danPermukiman Layak Huni Penurunan Luasan KawasanPermukiman Kumuh
3	Meningkatnya Mitigasi Bencana Indikator : Indeks Resiko Bencana	4	Meningkatnya Mitigasi Bencana Indikator Indeks Resiko Bencana
4	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban	5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban

5. *Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 5

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomikreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Indikator : 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Gini Ratio (Indeks Gini)
	Sasaran		Sasaran
1	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antarpenduduk Indikator : Indeks Gini (Gini Ratio)	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Indikator % Kontribusi Sektor Perdagangan TerhadapPDRB
2	Meningkatnya Nilai Investasi Indikator : Laju Pertumbuhan Investasi	2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Indikator : % Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
3	Meningkatnya peran industri dan perdaganganserta jasa dalam stabilitas perekonomian Indikator : 1. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) 2. Laju pertumbuhan Sektor Perdaganganan Jasa (%)	3	Meningkatnya Investasi Indikator : Laju Pertumbuhan Investasi (%)
	-	4.	Menurunnya Angka Kemiskinan Indikator : Angka Kemiskinan
	-	5.	Menurunnya Angka Pengangguran Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	-	6	Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator : Indeks Desa Membangun (IDM)

d. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.



Tabel 2.8
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatera	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	Meningkatkan Birokrasi yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapatabel
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
			Meningkatnya Mitigasi Bencana
	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Keter-tiban dan keamanan Masyarakat
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
			Meningkatnya Nilai Investasi
			Menurunnya Angka Kemiskinan
		Meningkatnya Kemandirian Desa	

e. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Sebagai "Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.



Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota:

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatera							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	1	Penguatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas dari SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata
						2	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
						3	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional
						4	Penguatan Pelaku Sadar Wisata
				2	Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1	Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanakan event kepariwisataan
						2	Pengembangan destinasi wisata



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
						3	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
						4	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan
						5	Pengembangan Desa Wisata
				3	Meningkatkan daya saing pariwisata.	1	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM
						2	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
						3	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
						4	Menetapkan satu destinasi unggulan
				4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	1	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
						2	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
				5	Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
						2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif



Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya									
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
(1)		(2)		(3)		(4)			
2	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan		
						2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		
						3	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah		
						4	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun		
						5	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar		
						2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
								2	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa Kartu Pariaman Pintar
								3	Peningkatan Daya Saing Pendidikan
						2	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata		
		3	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan						
		4	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter Anak Usia Dini						
		3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	1	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat		
2	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak								
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar								



TUJUAN (1)		SASARAN (2)		STRATEGI (3)		ARAH KEBIJAKAN (4)	
				2	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
						2	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
							Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
							Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
							Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
		3	Menurunnya prevalensi stunting	1	Konvergensi penanganan stunting	1	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di Setiap kecamatan
						2	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
						3	kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
				2	Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah	1	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Kota
						2	Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan
						3	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/ akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Pariaman dan penguatan sektor strategis Kota Pariaman	1	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
						2	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru
				2	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	1	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
						2	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
						3	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City							
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan akuntabel	1	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur
						2	Penguatan Pengawasan
						3	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
						4	Deregulasi Kebijakan
						5	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang kapabel		Meningkatkan kapabilitas baik secara kelembagaan maupun secara Individu ASN	1	Penguatan impelemenasi manajemen berbasis merit sistem
						2	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
						3	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
						4	Penyederhanaan Organisasi



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	2	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				2	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						2	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi Publik
Misi 4 : Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	1	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						2	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						2	Peningkatan penanganan sampah
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	1	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						2	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						3	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	2	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				2	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						2	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi Publik
Misi 4 : Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	1	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						2	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						2	Peningkatan penanganan sampah
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	1	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						2	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						3	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
				2	Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.	1	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		4	Meningkatnya MitigasiBencana	1	Meningkatkan system ketahanan daerah	1	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
						2	Meningkatkan kesiapsiagaan daerahdalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
						3	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
						4	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
				2	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	1	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
						2	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
						3	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
						4	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
						5	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencanagempa yang berpotensi tsunami
		5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban	1	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
						2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
				2	Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat	1	Meningkatkan penegakan perda tentang ketertiban umum
						2	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat



Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	1	Mendorong peningkatan peningkatan-an kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
						2	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
						3	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.
						4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif
		2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	1	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
						2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
		3	Meningkatnya Investasi	1	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	1	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
						2	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
				2	Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal	1	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
						2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		3	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha				
		4	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi				



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		4	Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	1	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
						2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
						3	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
						4	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlidungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Paiaman sosial
		5	Menurunnya Angka Pengangguran	1	Perluasan kesempatan kerja dan Peluang Usaha	1	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
						2	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata
						3	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
						4	Peningkatan jaringan tenaga kerja
						5	Menumbuhkembangkan wirausaha baru
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
						2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
						3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
				2	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa	1	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
						2	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa



Adapun Program Unggulan dari Pemerintah Daerah adalah:

1.	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
2.	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
3.	Kartu Pariaman Pintar
4.	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
5.	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
6	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
7	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman
8	Lanjutkan Pembangunan GOR
9	Pembangunan Youth Centre
10	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
11	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (TingkatSLTP), MDU (Tingkat SLTA)
12	Program Pariaman Sejahtera
13	Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
14	Pengembangan jalan sisi timur pariaman.
15	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
16	Pengembangan <i>water front city</i>
17	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
18	Revitalisasi PKK
19	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran –sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kota Pariaman selama periode RPJMD disertai indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2018-2023. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

MISI I :

Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan Spending Of Money



Misi 2 :

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah
			2	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
		Menurunnya Prevalensi Stunting	2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Pendapatan Per Kapita (PDRB)

Misi 3 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
1	Meningkatkan Birokrasi yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Nilai SAKIP
			2	Opini BPK terhadap LKPD
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapatabel	1	Indeks SPBE
			2	Indeks Profesional ASN
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik

Misi 4:

Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Meningkatnya kualitas Insfrastruktur		Indeks Insfrastruktur Daerah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh
			2	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni
		Meningkatnya Mitigasi Bencana		Indeks Resiko Bencana
Meningkatnya Ketentraman , Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Indeks Keamanan dan Ketertiban		



**Misi 5:
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
Yang Berbasis Lokal**

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
		Meningkatnya Investasi	1	% Pertumbuhan Investasi
		Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan (%)
		Menurunnya Angka Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SOPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan spending of money	Dinas Pariwisata
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
4.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	
5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan / PDRB Per Kapita	Dinas Perindagkop Usaha Menengah, Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP	Bappeda Inspektorat Setda
		Opini BPK terhadap LKPD	BPKPD Inspektorat
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapabel	Indeks SPBE	Dinas Kominfo
		Indeks Profesional ASN	BKPSDM
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Setda (Bagian Organisasi)
9.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan



10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Dinas Perkim, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	
		Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	
12.	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	BPBD
13.	Meningkatnya Ketentraman , Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Dinas Pol.PP
14.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Dinas Perindagkop Usaha Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan
16.	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Investasi	DPMPTSP
17.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	BAPPEDA, Dinas Sosial
18.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	DPMPTSP
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	DPMDES

2.3.Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



3. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
4. sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kota Pariaman dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia, masih banyaknya kelemahan dari RPJMD dan Renstra OPD, diantaranya:

- masih adanya Indikator yang belum dapat diukur, sehingga kesulitan dalam melakukan pengukuran capaian kerjanya;
- adanya program dan kegiatan yang belum sinkron dalam pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan.

untuk itu Pemerintah Kota Pariaman telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap RPJMD dan Renstra OPD.

Disamping itu dengan masih adanya Wabah Covid-19, maka untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Pariaman melakukan Refocusing dan realokasi anggaran dengan melakukan pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan, yang berpengaruh terhadap capaian dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagai berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
			SEBELUM	SETELAH	
			PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI I : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya Terbaik di Sumatera					
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Spending of Money	3,8%	3,7%	Target berubah
MISI II : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya					
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	14,56 tahun	14,56 tahun	Tetap
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,09 tahun	10,80 tahun	Target berubah
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	70,88 tahun	70,88 tahun	Tetap
3	Menurunnya Prevelensi Stunting	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	9,52%	16,80%	Tetap
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	13,55 juta	13,55 juta	Tetap
MISI II : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City					
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	60,06 (B)	70,05 (BB)	Target berubah
		Opini BPK	WTP	WTP	Tetap
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Kapabel	Indeks SPBE	3,2	2,6	Target berubah
		Indeks Profesional ASN	58	52,4	Target berubah
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	86,65	86,65	Tetap
MISI IV : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana					
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	66,27	66,27	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	63,6	63,6	Tetap
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	7,69	7,69	Tetap
		Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	81,78	78,19	Target berubah
4	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	Tetap
5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertibandan Keamanan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	68,5	68,5	Tetap



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
			SEBELUM	SETELAH	
			PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
MISI V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal					
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perda-gangan Terhadap PDRB	15,43%	15,43%	Tetap
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	18,57%	18,57%	Tetap
3	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Investasi	1,85%	1,85%	Tetap
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,70%	4,10%	Target berubah
5	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,10%	5,40%	Perubahan Target
6	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7710	0,7710	Tetap



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	892.735.000	879.150.000	(13.585.000)
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	420.000.000	327.750.000	(92.250.000)
3	Program Pembinaan Sejarah	39.525.000	39.525.000	-
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	44.700.000	44.700.000	-
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	1.872.094.060	1.902.080.284	29.986.224
6	Program Pemasaran Pariwisata	604.511.760	520.336.760	(84.175.000)
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	36.860.000	36.860.000	-
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	491.044.000	491.044.165	165
9	Program Pengelolaan Pendidikan	28.806.372.974	28.547.774.974	(258.598.000)
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.126.500.000	1.126.500.000	-
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.052.600.000	2.052.600.000	-
12	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	443.700.000	443.700.000	-
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.771.129.098	25.628.939.432	(2.142.189.666)
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	363.335.000	400.105.400	36.770.400
15	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	292.269.774	389.831.774	97.562.000
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	889.120.750	413.214.000	(475.906.750)
17	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	179.000.000	189.000.000	10.000.000
18	Program Perlindungan Perempuan	36.193.750	180.657.750	144.464.000
19	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.930.000	28.930.000	-
20	Program Pemenuhan Hak Anak	36.165.000	36.165.000	-
21	Program Perlindungan khusus Anak	0	307.336.000	307.336.000
22	Program Pengendalian Penduduk	79.200.000	80.460.000	1.260.000
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.181.382.800	1.274.736.800	93.354.000
24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.319.069.500	1.531.780.300	212.710.800
25	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	545.405.090	543.438.090	(1.967.000)



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Program Penanganan Kerawanan	36.823.900	30.843.900	(5.980.000)
27	Program Pengawasan Keamanan Pangan	7.188.240	7.118.240	(70.000)
28	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.080.972.000	892.624.000	(188.348.000)
29	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	414.442.000	407.992.000	(6.450.000)
30	Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan	50.570.000	50.570.000	-
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	975.493.742	742.293.742	(233.200.000)
32	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.628.410.000	5.249.705.000	(378.705.000)
33	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	131.085.000	91.460.000	(39.625.000)
34	Program Penyuluhan Pertanian	331.572.000	285.772.000	(45.800.000)
35	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	170.759.500	250.759.500	80.000.000
36	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	79.409.500	79.409.500	-
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	20.000.000	20.000.000	-
38	Program Hubungan Industrial	12.000.000	12.000.000	-
39	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000	-
40	Program Pelayanan Penanaman Modal	45.158.500	45.158.500	-
41	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	345.997.000	345.997.000	-
42	Program Pemberdayaan Sosial	493.930.044	540.930.044	47.000.000
43	Program Rehabilitasi Sosial	88.100.000	88.100.000	-
44	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	74.466.800	47.890.000	(26.576.800)
45	Program Penanganan Bencana	87.198.000	87.198.000	-
46	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	32.141.446	30.941.446	(1.200.000)
47	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	36.195.250	36.195.250	-
48	Program Pendidikan dan Latihan	404.200.000	404.200.000	-
49	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	37.742.250	37.742.250	-



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	Program Pengembangan UMKM	130.000.000	95.430.000	(34.570.000)
51	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.470.007.900	1.246.109.900	(223.898.000)
52	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	49.856.000	45.056.000	(4.800.000)
53	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	176.488.500	266.772.500	90.284.000
54	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	103.110.000	99.110.000	(4.000.000)
55	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	830.550.500	839.827.559	9.277.059
56	Program Penataan Desa	49.240.000	23.080.000	(26.160.000)
57	Program Peningkatan Kerjasama Desa	2.400.000	0	(2.400.000)
58	Program Administrasi Pemerintah Desa	546.458.869	420.408.500	(126.050.369)
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.033.920.000	2.964.436.000	(69.484.000)
60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332.994.470.085	346.727.387.942	13.732.917.857
61	Program Pembinaan Perpustakaan	162.169.000	374.494.000	212.325.000
62	Program Pengelolaan Arsip	5.381.500	47.972.000	42.590.500
63	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.630.000	2.630.000	-
64	Program Perekonomian dan Pembangunan	327.610.000	312.960.000	(14.650.000)
65	Program Penyelenggaraan Pengawasan	886.962.769	773.751.269	(113.211.500)
66	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	831.207.729	931.405.026	100.197.297
67	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.153.370.000	1.447.290.000	293.920.000
68	Program Aplikasi Informatika	1.838.865.320	2.076.770.320	237.905.000
69	Program Penyelenggaraan Statistik	31.250.000	29.250.000	(2.000.000)
70	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	85.158.350	51.157.350	(34.001.000)
67	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.153.370.000	1.447.290.000	293.920.000
68	Program Aplikasi Informatika	1.838.865.320	2.076.770.320	237.905.000
69	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	31.250.000	29.250.000	-2.000.000
70	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	85.158.350	51.157.350	-34.001.000
71	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	92.491.166.693	92.609.154.885	117.988.192
72	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.188.225.940	1.168.401.274	(19.824.666)
73	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.135.123.758	2.117.704.958	982.581.200
74	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	836.905.500	993.655.500	156.750.000



75	Program Koordianasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.431.377.655	1.147.008.605	(284.369.050)
76	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	492.621.750	251.170.500	(241.451.250)
77	Program Kepegaw aian Daerah	2.738.723.260	2.773.053.260	34.330.000
78	Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.818.326.000	11.682.712.400	1.864.386.400
79	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	529.013.462	395.993.462	(133.020.000)
80	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.551.773.913	1.286.938.350	(264.835.563)
81	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	961.921.536	913.721.536	(48.200.000)
82	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.800.000	12.428.000	(6.372.000)
83	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	3.707.057.150	3.816.336.150	109.279.000
84	Program Pembinaan dan Pengaw asan Pemerintahan Desa	123.920.500	123.479.000	(441.500)
85	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5.841.024.363	5.697.777.129	(143.247.234)
86	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	977.514.987	1.174.014.987	196.500.000
87	Program Penataan Bangunan Gedung	13.847.150.000	6.640.245.000	(7.206.905.000)
88	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.295.173.560	995.849.560	(299.324.000)
89	Program Penyelenggaraan Jalan	37.728.381.692	32.371.066.542	(5.357.315.150)
90	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	75.567.750	61.709.750	(13.858.000)
91	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	208.372.000	300.043.000	91.671.000
92	Program Pengelolaan Izin Lokasi	13.749.843	20.549.843	6.800.000
93	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	52.998.760	52.998.760	-
94	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.999.945	14.999.945	-
95	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	286.829.500	336.583.500	49.754.000
96	Program Penatagunaan Tanah	57.054.000	500.000	(56.554.000)
97	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.146.845.013	3.794.371.215	647.526.202
98	Program Pengelolaan Pelayaran	626.583.920	449.670.000	(176.913.920)
99	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahanan	1.140.000.000	1.140.000.000	-
100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Air Limbah	4.431.332.500	4.396.772.370	(34.560.130)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman

101	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Drainase	147.850.000	91.100.000	(56.750.000)
102	Program Pengembangan Permukiman	525.225.000	525.225.000	-
103	Program Pengembangan Perumahan	54.387.500	54.387.500	-
104	Program Kaw asan Pemukiman	5.898.487.000	5.998.487.000	100.000.000
105	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.505.111.548	1.205.307.074	(299.804.474)
106	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.731.370.984	1.781.983.050	(1.949.387.934)
107	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.366.687.600	1.352.573.400	(14.114.200)
108	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	35.585.950	53.540.950	17.955.000
109	Program Pembinaan dan Pengaw asan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.032.500	21.732.500	(10.300.000)
110	Ptogram Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	17.861.500	11.751.000	(6.110.500)
111	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.920.000	2.920.000	-
112	Program Pengelolaan Persampahanan	2.919.410.070	2.840.609.570	(78.800.500)
113	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.686.977.900	3.353.454.594	666.476.694
114	Program Penanggulangan Bencana	1.534.060.000	1.549.750.000	15.690.000
115	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.468.132.560	344.992.858	(3.123.139.702)
116	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.598.050.056	1.756.550.056	158.500.000
117	Program Pendaftaran Penduduk	257.630.500	104.930.500	(152.700.000)
118	Program Pencatatan Sipil	7.707.000	7.707.000	-
119	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	13.630.000	22.630.000	9.000.000
120	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.228.250	27.228.250	-
121	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	49.200.000	0	(49.200.000)
122	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Prolitik	76.865.000	243.035.000	166.170.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman

123	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	17.500.000	17.500.000	-
124	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	314.295.000	547.173.000	232.878.000
	Jumlah	637.913.546.118	634.640.292.250	(3.273.253.868)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pariaman, melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

3.2. Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi ditambah dengan perbandingan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi



Pemerintah Kota Pariaman serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau semakin rendah realisasi semakin tinggi capaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada table dibawah ini :



No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

A. Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya					
Sasaran 1					
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase Pertumbuhan spending of money	3,7%		1,93%		52%
Misi II: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya					
Sasaran 1					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka Harapan Lama Sekolah	14,56	tahun	14,61	tahun	100,3%
Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,80	tahun	10,78	tahun	99,8%
Sasaran 2					
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka Usia Harapan Hidup	70,88	tahun	70,67	tahun	99,7%
Sasaran 3					
Menurunnya Prevalensi Stunting					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Prevalensi Stunting	16,8		9,00		146%
Sasaran 4					
Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	13,55	juta	13,150	juta	97%



Misi III : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City				
Sasaran 1				
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,05	61,08	87,2%	
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	
Sasaran 2				
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel				
Indeks SPBE	2,6	2,64	101,5%	
Indeks Profesional ASN	52,4	42,85	81,8%	
Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	86,25	79,21	91,8%	
Misi IV: Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Insfrastruktur Daerah	66,27	62,09	93,7%	
Sasaran 2				
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	7,69	47,09	612,4%	
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	78,19	92,44	118,2%	
Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,60	56,35	89%	
Sasaran 4				
Meningkatnya Mitigasi Bencana				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Resiko Bencana	171	(Tinggi)	171 Tinggi	100%
Sasaran 5				
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	68,5	84,4	123%	



Misi V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Lokal			
Sasaran 1			
Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan Terhadap PDRB			
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,43%	15,45%	100,1%
Sasaran 2			
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,57%	17,73%	95,5%
Sasaran 3			
Meningkatnya Investasi			
% Pertumbuhan Investasi	1,85	0,73	39%
Sasaran 4			
Menurunnya Angka Kemiskinan			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Angka Kemiskinan	4,10	4,13	99,3%
Sasaran 5			
Menurunnya Angka Pengangguran			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,40	5,19	103,9%
Sasaran 6			
Meningkatnya Kemandirian Desa			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Desa Membangun	0,7710	0,7744	100,44%



B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

MISI I. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya terbaik di Sumatera

Sasaran 1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2020	2019
1	Persentase Pertumbuhan spending of money	3,7%	1,93%	52%	39%	-611%	749%
Rata-rata capaian				52%	39%	-305,5%	-

Sasaran 1 dengan indikator *Persentase Pertumbuhan Spending of Money* target Tahun 2022 sebesar 3,7% hanya terealisasi 1,93% dengan capaian 52%, capaian ini naik jika dibandingkan dengan Tahun 2021 target 3%, hanya terealisasi 1,17% dengan capaian sebesar 39%. Capaian persentase pertumbuhan Spending of Money tahun 2021, mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana capaian minus 611% dari target 3,5%.

Formula untuk menghitung Persentase pertumbuhan Spending of Money adalah:

% pertumbuhan Spending Of Money	=	$\frac{\text{Jml pengeluaran 2022} - \text{Jml pengeluaran 2021}}{\text{Jml pengeluaran 2021}}$	x	100%
---------------------------------	---	---	---	------

%pertumbuhan Spending Of Money	=	$\frac{295.824 - 101.000}{101.000}$	x	100%
	=	$\frac{194.824}{101.000}$	x	100%
	=	1,93		

Terkait realisasi Spending of Money (Rata-rata pengeluaran wisatawan) pada tahun 2022 dapat dicapai sebesar Rp. 295.824,-/hari/wisatawan dari target sebesar Rp. 110.000,-/hari/wisatawan adanya kenaikan sebesar Rp. 185.824,- dari tahun 2021 hanya sebesar Rp.101.000,-/hari/wisatawan, tahun 2020 sebesar Rp. 101.711,-/hari/wisatawan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 125.000/hari/ wisatawan.



Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak selama dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Dengan menurunnya kondisi dan situasi Pandemi Covid-19, sektor pariwisata khususnya di Kota Pariaman mulai menggeliat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wisatawan dari luar Kota Pariaman yang melakukan kunjungan wisata ke Kota Pariaman.

Tingkat kunjungan wisatawan dari Tahun 2020 sejak Pandemi Covid mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di Tahun 2022 pasca Pandemi Covid Tingkat Kunjungan wisatawan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu berjumlah **2.136.782** orang wisatawan, naik sebanyak 1.881.531 orang (837%) dari Tahun 2021 dimana tingkat kunjungan hanya **255.551 orang**, dan di tahun 2020 hanya jumlah **112.368 orang**, Hal ini ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
JUMLAH WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA PARIAMAN
DARI TAHUN 2018 -2022

No	WISTAWAN	TAHUN					LAJU PERT./ TAHUN
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Domestik	3.320.825	3.924.570	112.278	255.251	2.136.782	19.499
2	Mancanegara	1.735	258	90	-	-	4,17
	Total	3.322.560	3.924.828	112.368	255.251	2.136.782	19.504

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terlihat perbandingan angka jumlah kunjungan wisatawan mulai tahun 2018 berjumlah 3.322.560 di tahun 2019 naik menjadi 3.924.828 naik 603.745 (118%), sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan hanya berjumlah 112.368 (minus 3.812.292) (3493%), Tahun 2021 naik menjadi 255.251 (277%), dan Tahun 2022 naik dengan sangat signifikan yaitu 2.136.782 (837%).

Naiknya Tingkat Kunjungan disebabkan beberapa hal:

1. telah normalnya kondisi pasca Pandemi Covid 19, sehingga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.



2. adanya pengembangan destinasi wisata baru, seperti Wisata Sawah di Desa Pauh Timur;
3. moda transportasi, seperti Kereta Api yang stasiunnya dekat ke objek wisata;
4. adanya Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir secara Elektronik, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan bagi pengunjung di kawasan wisata dengan menggunakan aplikasi e-retribusi dan tempat khusus parkir. Implementasi Peraturan Walikota ini dilakukan dengan mengacu serta memberlakukan beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Untuk meningkatkan rata-rata pengeluaran/belanja wisatawan, Pemerintah Kota Pariaman melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Pariaman.

Beberapa strategi yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain :

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Optimalisasi Pemasaran Pariwisata;
- 3) Calendar of Events

Hambatan tidak tercapainya target dari sasaran ini, diantaranya:

- 1) masih kurangnya sarana pendukung pariwisata, seperti hotel;
- 2) masih kurangnya promosi wisata.

Adapun perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dari Tabel berikut :



Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan spending of money	%	5,5	3,5	4,5	3,5	3,7	26,2	(21,38)	1.17	1,41

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terlihat bahwa jika dibandingkan realisasi capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,17 % dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 sebesar 5,5 %, artinya masih terdapat *gap* sebesar 3,48 % yang harus dapat dipenuhi pada 2 (dua) tahun terakhir periode RPJMD 2018-2023, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2023. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan program yang dapat mendukung pencapaian target indikator % pertumbuhan Spending of Money pada akhir periode RPJMD.

Alokasi Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian Sasaran ini berjumlah Rp. 4.241.446.209,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.940.124.212,- (92,9%) dengan beberapa program antara lain :

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 4) Program Pembinaan Sejarah
- 5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 6) Program Pemasaran Pariwisata
- 7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 8) Program Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .



Misi II: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

**Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun			
						2022	2021	2020	2019
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,56	tahun	14,61	tahun	100,3%	100%	99,6%	99,9%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,80	tahun	10,78	tahun	99,8%	98,4%	97,2%	98,0%
<i>Rata-rata capaian</i>						100,1%	99,22%	98,38%	99,0%

Realisasi capaian dari Sasaran 1 Misi II yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, dengan rata-rata capaian 100,1% .Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman mengalami sedikit kenaikan dari tahun ke tahun. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman berada pada Angka 14,61 berada pada urutan ke 4, berada di bawah Kota Bukittinggi dengan angka 14,98, Kota Padang Panjang 15,07 dan yang tertinggi Kota Padang dengan angka 16,54 dan berada di atas capaian rata-rata nasional hanya 13,10 dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 14,10 tahun.

Sedangkan untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah, Kota Pariaman berada pada urutan ke 6 setelah Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Solok, sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah nasional hanya 8,69.

Demikian juga capaian angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman 10,78 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Nasional sebesar yang hanya 8,69 tahun maupun Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,18 tahun, meskipun angka tersebut masih jauh berada di bawah angka target maksimum yang ditetapkan oleh UNDP yaitu sebesar 15 tahun.



Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat

NO	PROV/KAB/KOTA	HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)				RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)			
		2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
1	Kota Padang	16,54	16,53	16,52	16,51	11,68	11,59	11,58	11,34
2	Kota Padang Panjang	15,07	15,07	15,06	15,05	11,92	11,63	11,62	11,45
3	Bukittinggi	14,98	14,98	14,97	14,96	11,63	11,34	11,33	11,32
4	Kota Pariaman	14,61	14,55	14,54	15,53	10,78	10,67	10,59	10,37
5	Kab. Tanah Datar	14,59	14,34	14,33	14,32	8,90	8,62	8,61	8,45
6	Kota Solok	14,34	14,33	14,32	14,31	11,35	11,04	11,03	11,02
7	Kota Payakumbuh	14,29	14,27	14,26	14,25	10,82	10,81	10,73	10,72
8	Kabupaten Agam	13,88	13,88	13,87	13,86	8,98	8,97	8,96	8,85
9	Kab. Padang Pariaman	13,93	13,68	13,67	13,62	8,16	7,88	7,87	7,86
10	Kab. Pasaman Barat	13,69	13,68	13,61	13,40	8,55	8,27	8,19	8,06
11	Kab. Pesisir Selatan	13,65	13,33	13,32	13,31	8,43	8,27	8,26	8,25
12	Kab. Lima Puluh Kota	13,40	13,30	13,29	13,28	8,08	8,07	7,99	7,98
13	Kota Sawahlunto	13,42	13,18	13,17	13,16	10,43	10,32	10,17	9,97
14	Kab. Solok	13,30	13,05	13,04	13,03	7,89	7,87	7,86	7,85
15	Kab. Kep. Mentawai	12,89	12,89	12,82	12,76	7,48	7,20	7,09	7,08
16	Kab. Pasaman	13,05	12,81	12,80	12,79	8,11	8,10	8,09	7,86
17	Kab. Solok Selatan	12,73	12,72	12,71	12,70	8,41	8,32	8,82	8,16
18	Kab. Dharmasraya	12,51	12,44	12,43	12,42	8,56	8,55	8,47	8,46
19	Kab. Sijunjung	12,64	12,38	12,37	12,36	8,30	8,12	8,11	8,10
20	Prov. SUMBAR	14,10	14,09	14,02	14,01	9,18	9,07	8,99	8,92
21	Nasional	13,10	13,08	12,98	12,95	8,69	8,54	8,48	8,34

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Angka Harapan Lama Sekolah, adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa depan. Angka Harapan Lama Sekolah, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem



pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro yang perhitungannya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman untuk Tahun 2022 adalah **14,61** tahun, yang artinya adalah bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 14,61 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai tamat/lulus Diploma 3, sebagaimana juga ditetapkan sebagai target pada RPJMD 2018-2023, dapat tercapai sebesar 100,3%.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman pada tahun 2022 berada pada angka **10,78 Tahun**, artinya rata-rata lama seorang anak menghabiskan waktu untuk sekolah adalah selama **10,78** tahun atau pada jenjang kelas 1 SMA/SMK. Angka ini menunjukkan capaian sebesar 99,8 % dari target pada RPJMD 2018-2023 yaitu sebesar **10,80** tahun

Untuk Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman mengalami kenaikan, karena adanya:

- 1) Program Wajib Belajar 12 tahun
 - 2) Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman.
 - 3) Program Beasiswa Bidik Misi dari Pemerintah Pusat.
- Program Wajib Belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Pariaman memiliki kebijakan “Pendidikan Gratis”, dengan memberikan subsidi biaya Pendidikan selama 12 tahun mulai dari SD sampai SMA/SMK Negeri. Berhubung SMA/SMK bukan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka untuk memberikan jaminan anak-anak peserta didik pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Pariaman mendapatkan dampak dari kebijakan ini, Pemerintah Kota Pariaman memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Provinsi Sumatera Barat yang diatur dengan Peraturan



Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai alokasi pendanaan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat bagi siswa/siswi SMA/SMK Negeri yang berada di Kota Pariaman, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa mengeluarkan biaya.

- Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA), yang ditargetkan pertahunnya sebanyak 100 orang, dan ditahun 2022 baru mencapai 67 orang. SAGA SAJA merupakan program yang bersifat pemberian bantuan beasiswa untuk kuliah gratis kepada anak kurang mampu hingga tamat pada jenjang Perguruan Tinggi yang ditunjuk/sudah bekerja sama. Dengan adanya SAGA SAJA, maka peluang anak yang telah tamat SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memenuhi kriteria dan persyaratan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi relatif besar.

SAGA SAJA, dananya berasal dari berbagai sumber, diantaranya APBD, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dan sumber lain yang tidak mengikat, seperti CSR.

Data mahasiswa SAGA SAJA , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
DATA PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA SAGA SAJA
TAHUN 2018-2022

NO	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH MAHASISWA					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Politeknik Negeri Padang (PNP)	10	26	8	2	4	40
2	Politeknik Akdemi Teknologi Industri (ATI) PADANG	-	3	49	67	28	147
3	Politeknik Pelayaran POLTEKPEL	-	6	-	1	-	7
4	Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP)	-	-	9	7	1	17
5	Universitas Indonesia	-	-	-	-	10	10
6	Institut Pertanian Bogor	-	-	-	-	2	2
7	TELKOM	-	-	-	-	8	8
8	UNAND	-	-	-	-	14	14
	JUMLAH	10	35	66	77	67	255



Dari Program SAGA SAJA mahasiswa yang telah tamat sebanyak 33 orang dan telah bekerja 5 orang, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
DATA MAHASISWA SAGA SAJA YANG SUDAH TAMAT DAN BEKERJA

NO	MAHASISWA ANGKATAN	JUMLAH	
		TAMAT	BEKERJA
1	2018	10	4
2	2019	23	1
	JUMLAH	33	5

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI & CAPAIAN TAHUN			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,58	14,54	14,60	14,55	14,56	14,53	14,54	14,55	14,61
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,34	10,60	10,90	10,84	10,80	10,37	10,59	10,67	10,78

Dari tabel di atas, terlihat realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah adanya trend peningkatan capaian selama 4 (empat) tahun terakhir, dimana capaian Tahun 2022 telah melampaui target sebesar 0,03 tahun dari target 14,58 Tahun yang akan dicapai pada akhir periode akhir RPJMD 2018-2023 .

Sedangkan capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 10,78 tahun, jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 11,34 tahun, masih terdapat *gap* sebesar 0,56 tahun.



Dengan demikian dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan, seperti pengembangan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan Program SAGA SAJA.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat didukung beberapa program, diantaranya:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 5) Program Pembinaan Perpustakaan
- 6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 7) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 8) Program Pembinaan Perpustakaan.

Dengan total anggaran sebesar Rp. 40.155.776.339,- dengan realisasi Rp. 31.923.175.616,- (79,50%)

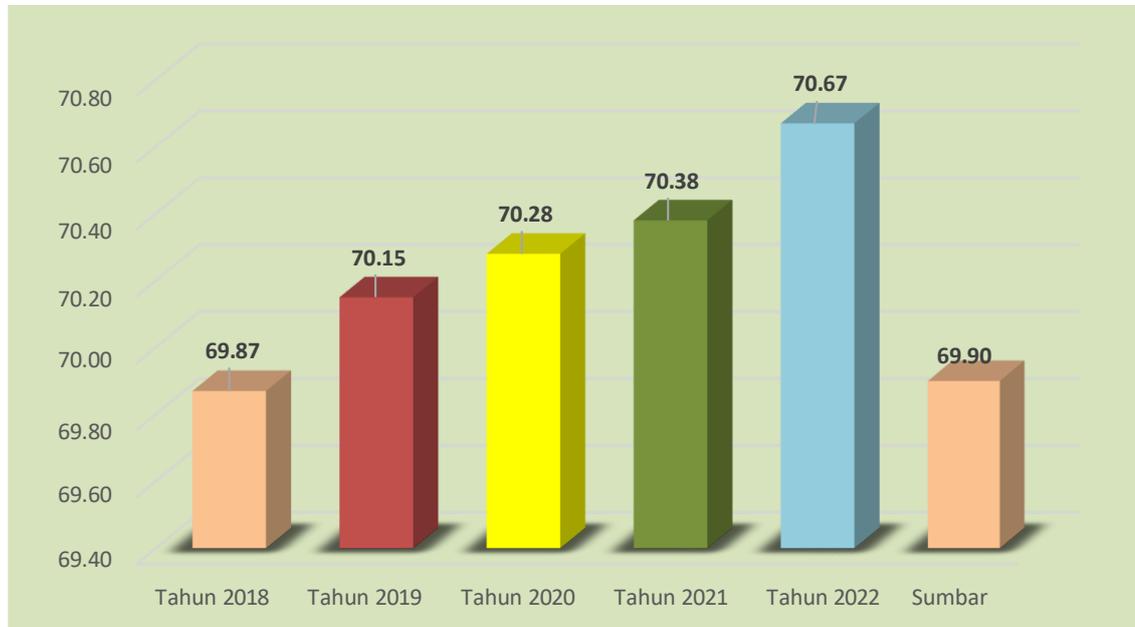
Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun			
						2022	2021	2020	2019
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,88	tahun	70,67	tahun	99,70%	99,97%	99,97%	100,1%
Rata-rata Capaian						99,70%	99,97%	99,97%	100,1%

Sasaran Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat dengan indikator " Angka Usia Harapan Hidup" dengan target 70,88 Tahun yang realisasinya 70,67 Tahun dengan capaian 99,70%, dimana dari dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik:

Grafik 3.1

Trend Angka Harapan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Hal yang mempengaruhi Naiknya Angka Usia Harapann Hidup antara lain :

1. Kemudahan akses pelayanan kesehatan,
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
3. Status ekonomi,
4. Penerapan pola hidup sehat
5. keadaan lingkungan ;
6. ketersediaan pangan ;
7. pendidikan,
8. kebijakan pemerintah ;dan sebagainya

Peningkatan harapan hidup disebabkan karena pola hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu

selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) tahun 2013 adalah sebesar 359/100.000 kelahiran hidup sedangkan target MDG's 2015 AKI adalah sebesar 102/100.000 kelahiran hidup.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) AKI di Indonesia turun menjadi 305/100.000 Kelahiran Hidup. Berikut adalah Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut

Grafik 3.2
ANGKA KEMATIAN IBU DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019-2022



Dilihat dari grafik diatas, angka kematian ibu di Kota Pariaman sejak tahun 2019-2022 berfluktuatif. Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 adalah 67/100.000 Kelahiran Hidup (1 orang) yaitu ibu nifas, penyebab dari kematian ibu pada tahun 2022 adalah post sectio syok sepsis.

Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75% dari total kasus



kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman.

Untuk kasus Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Pusat Kesehatan dan Informasi Kemenkes penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan (30.3%) dan hipertensi (27.1%). Hal ini sangat ironis, mengingat berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah, jika sang ibu mendapatkan perawatan medis yang tepat.

Berdasarkan data Kemenkes, sekitar 28,8% ibu hamil menderita hipertensi. Hipertensi bisa mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang menjadi faktor penyebab kematian pada ibu saat melahirkan. Selain itu, 32,9% ibu hamil mengalami obesitas dan 37,1% menderita anemia, bisa disebabkan faktor gizi dan asupan makanan yang kurang.

Angka kematian ibu (AKI) berkorelasi dengan angka kematian bayi (AKB). Sebagai upaya meminimalkan faktor risiko keduanya, para ibu hamil diimbau melakukan pemeriksaan berkala secara rutin setiap empat bulan sekali selama masa kehamilan sekaligus pemindaian faktor risiko kelainan atau penyakit yang dapat meningkatkan risiko kematian saat persalinan.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Ibu hamil yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.



3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Disamping Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga mempengaruhi Usia Harapan Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia dibawah 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup. Trend angka kematian bayi di Kota Pariaman Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.3
Angka Kematian Bayi di Kota Pariaman Tahun 2019-2022





Dari grafik di atas dapat dilihat angka kematian bayi di Kota Pariaman tahun 2019-2022 berfluktuatif. Angka kematian bayi di Kota Pariaman pada tahun 2022 adalah sebesar 17,4 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu 13,9. Ini juga merupakan Angka Kematian Bayi tertinggi selama 4 tahun terakhir.

Penyebab kematian bayi di Kota Pariaman sebagian besar disebabkan asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Beberap.

Upaya untuk mencegah BBLR ini adalah selain dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, upaya menjaga keselamatan bayi baru lahir juga ditentukan oleh kesehatan ibunya sendiri. Supaya berat badan bayi saat lahir normal, dalam artian tidak kurang maupun tidak lebih, ibu wajib menjaga pola makannya saat hamil. Contohnya dengan memperbanyak makan sayur dan buah, makanan tinggi serat dan asam folat, dan jenis makanan sehat lainnya. Semakin terpenuhi kebutuhan gizi ibu saat hamil, maka kesehatan ibu dan bayinya pun akan semakin optimal. Begitu juga dengan asfiksia dan infeksi pada bayi baru lahir. Kedua masalah kesehatan ini juga bisa dicegah sedini mungkin. Sedangkan untuk mencegah asfiksia pada bayi, itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Misalnya kalau sudah tahu persalinannya macet, maka bisa segera dilakukan operasi caesar. Jadi, bayi tidak perlu lama-lama di jalan lahir yang bisa bikin kehabisan oksigen.

Angka kematian bayi ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Dalam upaya menurunkan angka kematian bayi ini, bukan hanya tugas pemerintah atau dokter saja, seluruh masyarakat baik ibu hamil itu sendiri, suami atau keluarganya ikut andil dalam menurunkan angka kematian bayi ini.

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.



Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Meski demikian, angka harapan hidup ini berbeda pada tiap Negara. Angka harapan hidup ini mencakup berbagai parameter yang menjelaskan derajat kesehatan suatu daerah. Beberapa parameternya secara kuantitatif adalah angka kematian bayi, angka kematian anak dibawah 5 tahun, Sedangkan parameter kualitatif seperti jenis kelamin, genetik, akses ke pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, diet, nutrisi, gaya hidup dan tingkat kriminalitas.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota, serta Provinsi Sumatera Barat, Usia Harapan Hidup Kota Pariaman berada pada urutan 9, lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat. Adapun Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2019-2022

NO	KAB/KOTA	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Metode Baru) (Tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kota Bukittinggi	74,22	74,38	74,50	74,82
2	Kota Payakumbuh	73,61	73,74	73,84	74,14
3	Kota Solok	73,45	73,61	73,73	74,06
4	Kota Padang	73,57	73,65	73,69	73,93
5	Kota Padang Panjang	73,57	73,65	73,69	73,93
6	Kabupaten Agam	72,17	72,37	72,53	72,89
7	Kab.Dharmasraya	71,10	71,33	71,53	71,90
8	Kab.Pesisir selatan	70,73	70,86	70,96	71,25
9	<i>Kota Pariaman</i>	<i>70,15</i>	<i>70,28</i>	<i>70,38</i>	<i>70,67</i>
10	Kab. Tanah Datar	69,73	69,94	70,12	70,49
11	Kota Sawahlunto	69,87	70,00	70,10	70,40
12	Kab.Lima Puluh Kota	69,70	69,79	69,84	70,08
13	Kab.Padang Pariaman	68,58	68,79	68,97	69,34
14	Kabupaten Solok	68,34	68,58	68,79	69,19
15	Kab.Solok Selatan	67,58	67,81	68,01	68,38
16	Kab.Pasaman barat	67,67	67,82	67,94	68,25
17	Kab. Pasaman	67,18	67,40	67,59	67,96
18	Kab. Sijunjung	66,02	66,21	66,36	66,70
19	Kab. Kep. Mentawai	64,68	64,73	64,73	64,93
20	Prov. Sumatera Barat	69,31	69,47	69,59	69,90

Sumber Data BPS 2022 dan diolah

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Angka Usia Harapan Hidup yang tertinggi adalah Kota Bukittinggi 74,82, dan yang terendah Kabupaten Mentawai 64,93 sedangkan Kota Pariaman 70,67 berada di urutan 9 dan di atas Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 69,90 tahun,

Umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia saat lahir mencapai 71,85 tahun pada 2022. Angka tersebut meningkat 0,28 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 71,57 tahun, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4
Umur harapan Hidup Penduduk Indonesia Tahun 2012-2022



Sumber Badan Pusat Statistik

5 Negara dengan Angka Harapan Hidup paling tinggi adalah:

1. Monako sebesar 89,4 tahun, hal ini berangkat dari fasilitas kesehatan yang memadai dan pola makan sehat, yaitu Diet Mediterania yang fokus pada konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat.
2. Jepang sebesar 85,3 tahun, dengan kebiasaan mengonsumsi tahu, ikan laut, ubi manis, dan menghindari konsumsi daging berlebihan.
3. Singapura yaitu 85,2 tahun, menerapkan gaya hidup sehat, kondisi finansial stabil sehingga dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan baik.
4. Makau 84,6 tahun, dan
5. San Marino sebesar 83,1 tahun juga melakukan diet mediterania.



Di Indonesia 10 Propinsi dengan Angka Harapan Hidup tertinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 76,89 Tahun, Jawa Tengah 76,42, Jawa Barat 75,19 Tahun, DKI 74,91 Tahun, Bali 74,17 Tahun, Riau 73,62 Tahun, Jawa Timur 73,35 Tahun, Jambi 73,19 Tahun, Bangka Belitung 72,70 Tahun dan dan Lampung 72, 69 Tahun.

Adapun Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023 tercantum pada tabel:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
dengan Target Akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,18	70,07	70,30	70,53	70,88	70,15	70,28	70,38	70,67

Dari tabel 3.5 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 71,18 terdapat *gap* sebesar 0,51 tahun.

Melihat trendnya, Usia Harapan Hidup Kota Pariaman terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata peningkatan UHH setiap tahun sepanjang 2019-2022 sebesar 0,17 tahun. Adapun kenaikan UHH tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,29 tahun dan terendah tahun 2021, yakni 0,1 tahun, maka diprediksi target akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan.

Hal yang mempengaruhi naiknya Angka Usia harapan Hidup antara lain :

1. Kemudahan akses pelayanan kesehatan,
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
3. Status ekonomi,
4. Penerapan pola hidup sehat produktif dan berkualitas.



Untuk memperpanjang Angka Harapan Hidup, masyarakat dihimbau agar:

- 1) rajin berolah raga, karena dengan berolah raga membuat seseorang menjadi lebih sehat dan lebih bahagia;
- 2) menjauhkan diri dari stress, karena stress dapat menyebabkan seseorang mudah terserang beragam penyakit;
- 3) Istirahat yang cukup dan berkualitas;
- 4) meminimalisir melakukan kegiatan beresiko, seperti merokok atau meminum alkohol;
- 5) Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

Peningkatan AHH bukan hanya sekedar memperpanjang umur, melainkan juga soal hidup sehat produktif dan berkualitas. Masyarakat perlu melakukan peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar-generasi. Itu artinya, jika kualitas hidup generasi baik, maka pada generasi selanjutnya juga akan baik, bahkan lebih baik.

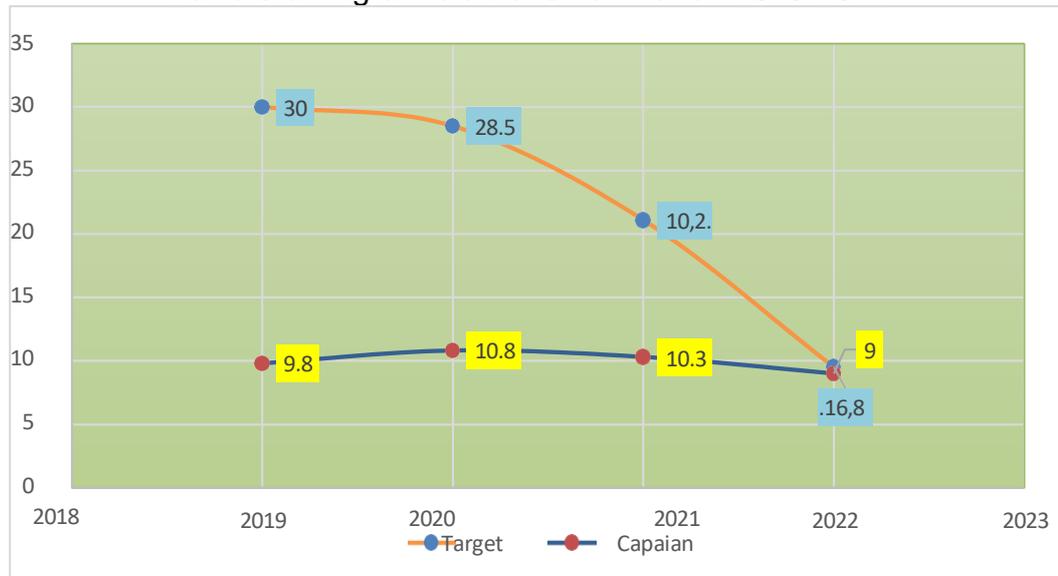
Sasaran 3 Menurunnya Prevalensi Stunting

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Prevalensi Stunting	16,8	9,00	146%	97%	-		-
Rata-rata Capaian				146%	97%			

Indikator Prevalensi Stunting dengan target 16,8 sedangkan realisasinya adalah 9 dengan capaian 147%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 prevalensi stunting target 10,02 realaisasi 10,3 dengan capaian 97%. Disini dapat dilihat terjadinya penurunan stunting 1,3.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Grafik 3.5
Balita stunting di Kota Pariaman Tahun 2018-2022



Jika dilihat pada grafik Prevalensi Stunting di atas, sejak tahun 2019 sampai Tahun 2022 terjadi fluktuasi capaian, dimana yang terendah adalah di Tahun 2022 yang ditargetkan 16,8 dengan realisasi 9,00 dan yang tertinggi adalah di Tahun 2020 sebesar 10,8. Capaian tahun 2022 ini cukup bagus karena adanya penurunan stunting sebesar 1,3 dari Tahun 2021. Ini menandakan bahwa upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan stunting di Kota Pariaman sudah memberikan hasil yang cukup signifikan dengan jalan:

- 1 memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada ibu hamil selama kehamilannya
- 2 memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir yang sesuai standar
- 3 memberikan edukasi dan konseling kepada ibu hamil tentang menjaga kesehatan selama kehamilan
- 4 meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka menurunkan stunting.

Angka prevalensi stunting Kota Pariaman jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat mencapai 25,20 persen dan Nasional rata-rata nasional 24,4 atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.



Untuk mencapai target 14 persen, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen, perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,"

Stunting masih bisa dicegah dan ditangani selama anak dalam masa seribu hari pertama kehidupan, yaitu 40 minggu di masa kehamilan pada anak usia satu tahun dan usia dua tahun.

Secara medis stunting merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak akibat multi faktor terutama akibat gizi buruk, infeksi berulang, pola asuh yang salah, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Penyebabnya yang paling mendominasi adalah gizi buruk.

Gizi buruk diakibatkan kurangnya nutrisi secara berkepanjangan. Anak yang mengalami gizi buruk di bawah usia satu tahun kata Darul, 25 persen berisiko memiliki tingkat IQ di bawah 70. Sedangkan 40 persen lainnya, berisiko memiliki IQ antara 71 hingga 90. Stunting menjadi permasalahan utama anak balita dan baduta di Indonesia. "Stunting tidak saja terjadi pada anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, namun kasusnya juga terjadi pada anak-anak yang berasal dari berbagai tingkat kesejahteraan sosial. Anak yang pendek belum tentu stunting, namun anak stunting sudah pasti pendek. Seringkali ada anggapan bahwa anak yang tidak tumbuh optimal (pendek) adalah akibat faktor genetika atau keturunan, padahal bisa saja karena stunting.

Masalah dan tantangan kita dalam penanganan stunting, diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, sehingga menimbulkan kesalahan pemahaman dalam penanganan dan pencegahan stunting. Sebagian masyarakat menganggap tidak penting asupan gizi seimbang dan bernutrisi cukup bagi anak, ibu hamil atau ibu menyusui.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting yaitu :

1. Pemantauan kesehatan secara optimal pada masa kehamilan yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi.



2. Pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC) secara rutin dan berkala.
3. Memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi (TKPM).
4. Memberikan pola asuh yang tepat
Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MP-ASI sampai anak berusia 2 tahun. World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menganjurkan agar bayi usia 6-23 bulan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang optimal.
5. Ketersediaan pangan di masing-masing keluarga.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan kualitas makanan harian yang dikonsumsi.
6. Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita.
7. Memberikan makanan tambahan (PMT) untuk balita.
8. Melakukan stimulasi dini perkembangan anak.
9. Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak.

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Menurunnya Prevalensi Stunting** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Stunting	%	8,9	-	-	10,02	16,8	-	-	10,03	9,00

Dari tabel 3.9 di atas terlihat perbandingan realisasi Prevalensi Stunting pada 2022 adalah 9, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 8,9 terdapat *gap* sebesar 0,1, mudah-mudahan target ini akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD. Dengan demikian dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan.



Adapun upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting, yaitu:

1. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanganan stunting
2. meningkatkan peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain untuk keberhasilan pencegahan stunting.

Alokasi Anggaran untuk mencapai *Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* dan *Sasaran Prevalensi Stunting* adalah sebesar **Rp. 30.461.156.456** dengan realisasi **Rp 28.152.788.679. (92,42%)**

Program yang mendukung sasaran 2 dan Sasaran 3 di atas, diantaranya:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 5) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 6) Program Perlindungan Perempuan
- 7) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 8) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 9) Program Perlindungan Khusus Anak
- 10) Program Pengendalian Penduduk
- 11) Pembinaan Keluarga Berencana
- 12) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran 4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian Tahun				
					2022	2021			
1	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	13,55 juta	13,150	juta	97%	97%	-	-	-
Rata-rata Capaian					97%	97%	-	-	-

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan yang ditargetkan Rp.13.55 Juta dengan realisasi Rp. 13.150 juta dengan capaian 97%.



Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli .

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga barang serta jasa. Kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Namun kebalikannya, kemampuan beli masyarakat nantinya akan meningkat apabila harga-harga tersebut menurun. *Tidak tercapainya target yang ditetapkan, disebabkan:*

1. masih belum stabilnya ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid19;
2. kenaikan harga ;
3. cuaca dan kondisi alam yang kurang baik yang berdampak kepada usaha, baik perdagangan maupun pertanian.

Tabel 3.10
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2019-2022

NO	KAB/KOTA	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Metode Baru) (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1	Kota Padang	14728	14.481	14.540	14.889
2	Kota Bukittinggi	13.586	13.282	13.331	13.633
3	Kota Payakumbuh	13.464	13.281	13.317	13.687
4	<i>Kota Pariaman</i>	<i>12.958</i>	<i>12.796</i>	<i>12.818</i>	<i>13.150</i>
5	Kota Solok	12.337	12.117	12.168	12.515
6	Kab.Dharmasraya	11.431	11.273	11.324	11.650
7	Kab.Padang Pariaman	11.158	10.988	11.050	11.159
8	Kota Padang Panjang	11.013	10.734	10.754	11.153
9	Kab. Tanah Datar	10.709	10.588	10.616	10.695
10	Kab.Solok Selatan	10.505	10.325	10.367	10.560
11	Kab. Sijunjung	10.395	10.361	10.389	10.582
12	Kabupaten Solok	10.309	10.171	10.215	10.539
13	Kota Sawahlunto	10.238	10.182	10.195	10.537
14	Kab.Lima Puluh Kota	9.842	9.596	9.668	10.035
15	Kab.Pesisir selatan	9.444	9.212	9.270	9.686
16	Kabupaten Agam	9.780	9.651	9.622	10.171
17	Kab.Pasaman Barat	9.180	9.047	9.089	9.381
18	Kab. Pasaman	8.599	8.425	8.440	8.619
19	Kab. Kep. Mentawai	6.429	6.281	6.321	6.567
20	Prov. Sumatera Barat	10.925	10.733	10.790	11.130

Sumber Data BPS 2022 dan diolah



Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Juta (Rp.)	14,00	-	-	13,15	13,15	-	-	12,82	13,150

Dari tabel 3.8 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan pada tahun 2022 Rp. 13.150 juta jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah sebesar Rp. 14,00 juta, terdapat *gap* sebesar Rp. 850.000,-. namun Pemerintah Kota Pariaman optimis target ini akan dapat dicapai pada akhir periode RPJMD. dengan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian sesuai target yang ditetapkan.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Program Pengelolaan Ikan Tangkap
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 9) Program Penyuluhan Pertanian
- 10) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 11) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Dengan total anggaran Rp. 8.226.804.427,- dengan realisasi keuangan Rp .7.309.889.520,- (88,42%).



Misi III : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City

**Sasaran 1
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,05	61,08	87%	98%	80%	94%	89%
2	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				94%	99%	90%	97%	95%

Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan 2 indikator Kinerja, yaitu: Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Opini BPK terhadap LKPD dengan rata-rata capaian 94%

➤ Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik .

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 yang di targetkan yaitu nilai BB (70,05) namun nilai masih B (61,08) poinnya naik sekitar 1,03 dari poin nilai Tahun 2021 dengan kategori nilai B (60,06).

Dengan Nilai 61,08 (B), dimana SAKIP Kota Pariaman cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan-perbaikan diantaranya:

1. memperbaiki indikator kinerja, agar lebih relevan dengan tujuan dan sasaran, serta memastikan formulasi perhitungan, sehingga komponen kunci yang mempengaruhi keberhasilan dapat dipahami serta dipastikan validitasnya;
2. mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down);



3. menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas dan kualitas capaian data kinerja yang dihasilkan pada tingkat Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah;
4. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi ditingkat Pemda dan Perangkat Daerah, serta rencana aksi, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian dan efektifitas strategi yang digunakan;
5. menyelesaikan pembuatan Aplikasi E-SAKIP yang digunakan untuk pengelolaan manajemen kinerja dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menggunakannya;
6. meningkatkan kualitas laporan kinerja baik tingkat Pemda maupun Perangkat Daerah dengan menyajikan analisis yang komprehensif, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
7. melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai serta menjadikan Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
8. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah;
9. Meningkatkan peran dan kapasitas Inspektorat sebagai evaluator dalam rangka perbaikan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman:

1. melakukan reviu terhadap Dokumen Perencanaan dan melakukan perbaikan terhadap dokumen kinerja secara menyeluruh;
2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP dan RB bagi Perangkat Daerah pada tanggal 20 s.d 21 Juni 2022 di Balaikota Pariaman;



- Melakukan Coaching Clinic Peningkatan Kapasitas Tim SAKIP dan RB Kota Pariaman pada tanggal 30 s.d 31 Juli 2022 di Jakarta



- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi APIP Pemerintah Kota Pariaman bersama Narasumber dari Tim Evaluator Kedeputan RB Kunwas Kementerian PAN RB





➤ *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah*

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI terhadap LKPD sejak tahun 2016 Sampai dengan tahun 2022.

Hal ini sangat penting mengingat WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya **Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,05	60,00	71,00	61,50	70,05	56,15	56,50	60,06	61,08
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari Tabel 3.11 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 adalah 61,08 adanya gap sebesar 8,97 poin dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 70.50. Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya untuk mencapai nilai sesuai dengan target akhir RPJMD.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



- 2) Program Koordianasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 6) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 8) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Dengan total anggaran Rp. 99.992.252.017,- dengan realisasi keuangan Rp .97.210.693.755,- (97,2%).

Sasaran 2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Indeks SPBE	2,6	2,64	102%	78%	103%	106%	
2	Indeks Profesional ASN	58	45,85	79%	83%			
Rata-rata capaian				90%	161%	103%	106%	

Sasaran Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel terdapat 2 indikator yaitu Indeks SPBE dan Indeks Profesional ASN dengan rata-rata capaian hanya 90%.

➤ **Indeks SPBE**

Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE pelaksanaan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen 47 indikator. Dari hasil evaluasi tersebut, Indeks SPBE Kota Pariaman Tahun 2022 adalah 2,64, sedangkan tahun 2021 Indeks SPBE 2,42 sedangkan Tahun 2020 Indeks SPBE 2,8 .

Penilaian SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- 1) kebijakan internal,
- 2) tata Kelola,
- 3) kelembagaan,
- 4) strategi dan perencanaan,



- 5) TIK,
- 6) layanan administrasi pemerintahan; serta
- 7) layanan publik berbasis elektronik.

Hasil Evaluasi SPBE 2022

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022

Pemerintah Kota Pariaman

K/L/D : Pemerintah Kota

Indeks SPBE : 2,64

Predikat SPBE : Baik

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE : 2,7

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 2,7

Domain Tata Kelola SPBE : 1,9

Perencanaan Strategis SPBE : 1,75

Teknologi Informasi dan Komunikasi : 2

Penyelenggara SPBE : 2

Domain Manajemen SPBE : 1

Penerapan Manajemen SPBE : 1

Audit TIK : 1

Domain Layanan SPBE : 3,63

Layanan Administrasi

Pemerintahan Berbasis Elektronik : 3,5

Layanan Publik Berbasis Elektronik : 3,83

Dari hasil rekap tingkat kematangan SPBE, masih banyak kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan SPBE Kota Pariaman, dimana tingkat kematangan dari indikator SPBE masih rendah diantaranya:

- 1) kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE;
- 2) kematangan inovasi proses bisnis SPBE ;
- 3) kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE;
- 4) Penerapan resiko SPBE;
- 5) Penerapan manajemen keamanan informasi;
- 6) Penerapan manajemen data.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks SPBE, diantaranya:

- 1) menyusun kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
- 2) menyusun proses bisnis SPBE;
- 3) menyusun SOP keamanan informasi;
- 4) menyusun peta resiko SPBE.

➤ **Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Sesuai Perka BKN tersebut, Indeks Profesionalitas ASN diukur menjadi 4 dimensi dengan bobot yang berbeda-beda yaitu:

- 1) Dimensi Kualifikasi (25%),
- 2) Dimensi Kompetensi (40%),
- 3) Dimensi Kinerja (15%) ; dan
- 4) Dimensi Disiplin (5%).

Capaian dari Indeks Profesionalitas ASN dihitung secara otomatis pada sistem pengukuran indeks profesionalitas (PIP) ASN <https://dj.ip.asn.bkn.go.id>, data pengukuran diolah dari aplikasi SAPK-BKN yang dikelola langsung oleh admin daerah (BKPSDM Kota Pariaman). Hasil penghitungan dilaporkan secara berkala oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai Wilayah Kerja/Regional masing-masing, dimana Kota Pariaman berada dilingkup BKN Regional XII Pekanbaru.

Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk Pemerintah Kota Pariaman berada di bawah Kabupaten Pesisir Selatan 49,93, Kabupaten Solok Selatan 46,97



Kabupaten Padang Pariaman 46,38 dan di atas kabupaten Solok 45,80. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Indeks Profesionalitas ASN beberapa Kabupaten Kota di Sumatera

Lampiran Surat Laporan Direktur Jabatan ASN
Nomor : 181/BM.02.01/C.II/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

INSTANSI	NILAI IP 2021						
	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kab. Bintan	2.909	12,30	9,12	24,14	4,99	50,55	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	5.700	12,54	8,99	23,93	5,00	50,46	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	4.989	12,14	8,73	24,40	5,00	50,26	Sangat Rendah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.766	14,28	11,56	19,38	4,99	50,22	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.579	12,34	8,02	24,67	4,91	49,94	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.824	13,23	11,22	20,49	4,98	49,93	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Karimun	3.527	12,24	8,21	24,45	4,99	49,89	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.529	12,36	9,06	22,94	5,00	49,36	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.124	13,36	8,20	20,42	4,99	46,97	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.331	13,46	10,35	17,58	5,00	46,38	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Pariaman	2.179	13,79	6,66	20,41	4,99	45,85	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Solok	4.650	13,31	10,50	16,99	4,99	45,80	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.101	12,55	9,87	17,96	5,00	45,38	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Lingga	2.510	12,66	7,93	19,62	5,00	45,21	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	4.600	12,60	9,61	15,22	5,00	42,43	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.335	12,27	5,45	11,23	5,00	33,95	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel di atas, penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman dihitung berdasarkan jumlah ASN terakhir, yaitu 2.179 Orang. Hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 bernilai 45,85 (Sangat Rendah).

Adapun penilaian IP ASN terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu:



- 1) dimensi *kualifikasi* dengan bobot nilai 25%, hanya memperoleh skor 13,79.

Dimensi kualifikasi diukur berdasarkan jenjang tingkat pendidikan formal yang terakhir dicapai oleh PNS.

Adapun jumlah dan tingkat pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Jumlah dan Jenjang Pendidikan PNS Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sekolah Dasar (SD)	2	0	2
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	2	6
Sekolah Menengah Atas (SMA)	112	66	178
Diploma 1 (D-1)	1	3	4
Diploma 2 (D-2)	8	22	30
Diploma 3 (D-3)	91	379	470
Sarjana (S1)/ Diploma 4 (D-IV)	502	1153	1655
Pasca Sarjana (S2)	103	100	203
Doktor (S3)	0	0	0
Jumlah	823	1725	2548

Untuk meningkatkan skor dimensi kualifikasi, Pemerintah Kota Pariaman membuka kesempatan seluas-luasnya agar PNS melanjutkan pendidikannya dengan mengajukan/mengikuti tugas belajar maupun izin belajar.

- 2) Pada dimensi kompetensi dengan Skor 40%, diperoleh skor hanya 6,66. Untuk dimensi kompetensi masih dikategorikan sangat rendah sekali. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.15
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan /Eselon

JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Eselon I	-	-	-
Eselon II	21	4	25
Eselon III	67	32	99
Eselon IV	94	79	173
Eselon V	-	-	-
Struktural	174	111	285
Fungsional Tertentu	316	1006	1322
Fungsional Umum	333	608	941
Jumlah	823	1725	2548

Dari 2.548 orang jumlah PNS, yang menduduki Jabatan Struktural 285 orang, sedangkan yang baru mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II baru 12 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III 17 orang, dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV baru 58 orang .

Sehingga Pemerintah Kota Pariaman harus berusaha mengejar skor agar meningkat dengan cara mengirim para pegawainya untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat kepemimpinan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural (eselon II, III dan IV), diklat fungsional bagi pejabat yang menduduki jabatan fungsional, diklat teknis bagi pegawai sesuai dengan tupoksinya minimal 20 (dua puluh) jp, dan mengikuti seminar/workshop/kursus sesuai dengan tupoksi pegawai tersebut.

- 3) Pada dimensi kinerja dengan bobot nilai 15%, diperoleh skor 20,41.

Dimensi kinerja merupakan riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Nilai dari dimensi kinerja masih dinyatakan sangat rendah dikarenakan pegawai masih lalai dalam melaporkan hasil kinerja pegawai tersebut. Pegawai masih menganggap bahwa SKP dan PKP diperlukan pada saat



pengurusan kenaikan pangkat saja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman melalui BKPSDM harus lebih aktif mengingatkan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Pariaman untuk melaporkan hasil penilaian kinerja mereka setiap tahunnya.

4) Pada dimensi disiplin dengan bobot 5% diperoleh skor 4,99.

Dimensi disiplin diukur dari data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, baik berupa hukuman disiplin berat, sedang dan ringan. Hukuman disiplin yang dimaksud yaitu hukuman yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pegawai di Pemerintah Kota Pariaman yang memiliki hukuman disiplin dengan kategori hukuman disiplin berat, sedang dan ringan persentasenya sangat kecil yaitu 0,01% dari jumlah pegawai yang ada sehingga tidak mempengaruhi pada bobot dimensi disiplin tersebut.

Perbandingan realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan Target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	Indeks	3,25	2,7	2.8	3,1	2,6	2,87	2,87	2,42	2,64
Indeks Profesional ASN	Indeks	62	-	-	55	54,2	-	-	45,78	45,85

Sangat rendahnya Indeks profesional ASN disebabkan, karena :

1. Kompetensi ASN rendah, karena berdasarkan jenjang pendidikan masih ada ASN yang berijazah SD 2 orang SMP 2 orang, SMA 174 orang, Diploma-1 4 orang, sedangkan yang S3 tidak ada
2. Penempatan PNS tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi;
3. Kurangnya pendidikan pelatihan yang diikuti oleh PNS, karena anggaran yang belum mendukung;
4. Kinerja belum optimal;
5. Disiplin kurang ditegakkan .



Upaya yang dilakukan untuk menaikkan Indeks Profesional ASN:

1. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi, melalui jalur pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar maupun izin belajar;
2. Penempatan ASN disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi
3. Meningkatkan kompetensi ASN melalui bimtek, seminar maupun diklat
4. Meningkatkan kinerja .
5. penegakkan disiplin secara menyeluruh ke ASN

Anggaran yang mendukung sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Kapabel sebesar Rp. 6.377.520.930,- dengan realisasi Rp. 5.862.204.102 (91,9%) dengan Program antara lain:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Program Aplikasi Informasi.
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program kepegawaian Daerah

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	86,25	79,21	91,8%	111%			
Rata-rata capaian				91,8%	111%			

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan prima, standar pelayanan publik yang jelas dan terus meningkatkan fasilitas penunjang di instansi yang kita miliki.

“Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik, adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah, yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat



merasakan manfaat yang nyata, dan lebih mudah serta diperhatikan, ketika berurusan dengan pemerintah ,”

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dari hasil Survey yang dilakukan terhadap 15 Organisasi Perangkat Daerah diperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat :

Tabel. 3.17
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2022

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SKM
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP,	86,72
2	DINAS SOSIAL	84,72
3	DINAS PENDIDIKAN	84,36
4	DINAS KESEHATAN	83,81
5	BPBD	83,09
6	DINAS PMPTSP	82,72
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	82
8	INSPEKTORAT	79,81
9	PUSKES KURAITAJI	79,27
10	DINAS PERTANIAN, PANGAN, dan PERIKANAN	78,90
11	PUSKESMAS NAREH	77,45
12	DINAS KOMINFO	74,90
13	DINAS PARIWISATA	74,54
14	DISKOPERINDAG	68,36
15	DINAS PUPR	67,45
RATA-RATA NILAI IKM KOTA		79,21

Sumber: Hasi Survey 2022



Dari hasil survey tersebut Perangkat Daerah yang memperoleh Nilinilai tertinggi adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup dengan Nilai 86,72 sedangkan yang terendah Dinas Pn, Penataan Ruang Dan Pertanahan dengan Nilai 67,45.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pemerintah Kota Pariaman merupakan salah satu penerima Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Indeks 4,51 (Kategori A) sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nilai 4,29 (Kategori A-) yang diumumkan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

DPMPTSP dan Naker Kota Pariaman, berhasil menjadi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pertama di lingkup Pemko Pariaman, yang meraih predikat tersebut, dan berada pada urutan ke 70 dari 514 DPMPTSP Kabupaten/Kota yang berhasil mendapat nilai A dari keseluruhan instansi DPTMPSP yang dievaluasi se Indonesia.

Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada urutan ke 98 dari 514 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dievaluasi se Indonesia.

Dari hasil penilaian Penilaian Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2022 terhadap DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman 4,4 (sangat Baik), indeks ini naik dari Tahun 2021 yang nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman 3,91 (Baik).

Disamping itu, untuk mendorong Penyelenggara Pelayanan Publik mematuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia



telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik, dimana berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Pemerintah Kota memperoleh Nilai 85,10 (baik) zonasi Hujau dengan opini Kualitas Tinggi .

Dari 98 Pemerintah Kota di Indonesia yang dinilai, Kota Magelang meraih Nilai Kepatuhan Tertinggi, yaitu 95,10 Zonasi Hijau Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi. Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke 30 setelah Pemerintah Kota Subulussalam dengan Nilai kepatuhan 85,10, sedangkan nilai kepatuhan yang terendah adalah Pemerintah Kota Binjai dengan Nilai Kepatuhan 45,16 zonasi Merah, kategori D dengan Opini Kualitas Rendah.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai Pelayanan Publik antara lain:

- 1) Pemko Pariaman tak henti-hentinya memberikan dorongan dan pembinaan agar semua standar dan norma dalam pelayanan publik dapat terwujud demi memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Kota Pariaman.
- 2) meningkatkan kualitas dan pelayanan publik di setiap Perangkat Daerah yang ada, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat .

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik	kategori	88,35	-	-	84,5	86,3	0	0	84,5	79,21

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran ini adalah Rp. 346.772.987.942 dengan realisasi 319.370.763.077 (92,1%)

MISI IV : Mewujudkan Kota Pesisir, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2020	2019
1	Indeks Infrastruktur Daerah	66,27	62,09	94%	102%	117%	102%
	Rata-Rata Capaian			94%	102%	117%	102%

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Untuk mewujudkan Misi IV, salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang diukur dengan Indeks Infrastruktur Daerah, sebagai indikasi terwujudnya kota yang memenuhi kualitas infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari target Indeks Infrastruktur Daerah yang ditetapkan sebesar 66,27 hanya terealisasi 62,09 dengan capaian 94%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 target 64,50 terealisasi sebesar 65,71 dengan capaian sebesar 102%., sedangkan



Tahun 2020 target sebesar 65,45 dengan realisasi sebesar 76,50 atau dengan capaian sebesar 117%.

Pengukuran Indeks Infrastruktur Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel/komponen yaitu persentase jalan kondisi mantap, persentase drainase kondisi baik dan persentase irigasi kondisi baik, dengan formulasi berikut :

$$\text{Indeks Infrastruktur Daerah} = \frac{\text{Persentase jalan dalam kondisi mantap} + \text{Persentase drainase kondisi baik} + \text{Persentase Irigasi kondisi baik}}{3} \times 100$$

Adapun capaian kinerja masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

1) Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap

Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap

NO	KONDISI JALAN	PANJANG (Km)				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Kondisi baik (mantap)			194,731	200,489	209,392
2	Kondisi sedang (mantap)			32,213	8,903	
3	Kondisi rusak ringan				38,014	77,836
4	Kondisi rusak berat				39,822	
Total panjang jalan kota				226,944	287,228	

Sumber : Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap} &= \frac{(\text{Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi mantap} : \text{Panjang Jalan Seluruh Kota}) \times 100 \%}{=} \\ &= \frac{200.489 + 8.903}{287.228} \times 100\% \\ &= \frac{209.392}{287.228} \times 100\% \\ &= 72,90\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari total panjang jalan yang merupakan ruas Jalan Kota tahun 2022 sepanjang 287,228 km. Jalan Kota dengan kondisi mantap sepanjang 209,392 km (72,90 %), sedangkan jalan Kota dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 77,836 km (27,10 %).



Dilihat dari tabel 3.19 di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2021 Panjang jalan kota hanya 226,94 km di tahun 2022 bertambah sepanjang 60,288 km sehingga menjadi 287,228 km.

2) Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

Panjang drainase kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik

NO	NAMA DRAINASE	TOTAL (KM)	PANJANG (KM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Drainase primer	19,122	7,34	7,64	7,84	7,97	-
2	Drainase sekunder	44,458	16,81	17,31	17,81	18,08	-
Total		63,58	24,15	24,95	25,65	26,05	-

Berdasarkan tabel 3.20 panjang drainase kota adalah 63,58 km dengan 2 kategori, yaitu drainase primer dan drainase sekunder, drainase dalam kondisi baik 26,05 km. jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir (2019-2022) selalu ada peningkatan rata-rata sepanjang 6,04 km per tahun.. Penghitungan pencapaian Persentase Panjang Drainase Kota dalam Kondisi Baik dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik} &= \frac{\text{Panjang drainase kota dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh drainase kota}} \times 100 \% \\
 &= \frac{26,05 \text{ km}}{63,58 \text{ km}} \times 100\% \\
 &= 40,97\%
 \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan 2022

3) Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Saluran

No	Jenis Saluran	Panjang (KM)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Irigasi Primer	1,027	1,027	1,027	1,027	1,117	
2	Irigasi Sekunder	41,832	41,832	41,832	56,578	57,058	
3	Irigasi Tersier	52,788	52,788	52,788	52,788	52,788	
	JUMLAH	95,647	95,647	95,647	110,393	110,963	

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2022

Sedangkan Panjang jaringan irigasi berdasarkan kondisi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi

No	Kondisi Saluran	Panjang (KM)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	67,65	69,95	67,95	79,73	80,332	
2	Sedang	-	-	-	-	-	
3	Rusak Ringan	-	-	-	-	-	
4	Rusak berat	28,00	25,70	21,70	30,66	30,63	
	JUMLAH	95,65	95,65	95,65	110,39	110,963	

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tahun 2022 total panjang jaringan irigasi adalah 110,963 km, sedangkan irigasi yang kondisinya baik 80,332 km (72,22%), sedangkan rusak berat 30,63 km. Jika dilihat jaringan irigasi dalam kondisi baik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Penghitungan pencapaian Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned} \text{Persentase panjang} &= (\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi} \\ \text{jaringan irigasi dalam} & \text{ baik: Panjang jaringan irigasi Seluruh Kota) x} \\ \text{kondisi baik} & \text{ 100 \%} \\ &= (80,33 \text{ KM} : 110,963 \times 100\%) \\ &= 72,39 \% \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2022

Berdasarkan penghitungan masing-masing variabel diatas, maka pengukuran capaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :



Indeks Infrastruktur Daerah	= (Persentase Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap + Persentase Panjang drainase kota dalam dalam kondisi baik + Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik) : 3 x 100 %
	= (72,90+40,97+72,39) : 3 x 100%
	= 62,09
<i>Sumber Data : DPUPRP Kota Pariaman 2022</i>	

Tidak tercapainya target Indeks Insfratraktur yang ditetapkan, karena salah satu dari variabel untuk penghitungan Indeks tersebut, yaitu variabel Persentase Panjang drainase kota dalam dalam kondisi baik hanya 40,97 capaian rendah, sedangkan dua variabel lainnya cukup tinggi yaitu Persentase Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap 72,90 sedangkan Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 72,39.

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Insfrastruktur jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Kualitas Insfrastruktur dengan target akhir
RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Insfrastruktur Daerah	Nilai	70	60,20	65,5	65,45	66,3	61,5	76,50	65,71	62,09

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, masih terdapat gap sebesar 7,91 poin antara realisasi capaian pada tahun 2022 dengan target Indeks Infrastruktur Daerah pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 70.

Dengan demikian perlu upaya dan strategi pencapaian pada 1 (satu) tahun sisa periode RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama untuk realisasi capaian pada variabel pembentuk yang masih rendah, yaitu variabel persentase drainase dengan kondisi baik dengan capaian baru sebesar 40,97 %.



Dalam upaya peningkatan capaian peningkatan persentase drainase dengan kondisi baik, dimana untuk kategori drainase primer yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman atau drainase primer yang berada pada jalur lintas wilayah kabupaten/kota, maka membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai baik melalui APBD Provinsi maupun fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN.

Program untuk mendukung sasaran ini adalah :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Gorong-gorong
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung
- 4) Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan
- 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 8) Program Pengelolaan Izin Lokasi.
- 9) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- 10) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
- 11) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah .
- 12) Program Penatagunaan Tanah .
- 13) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 14) Program Pengelolaan Pelayaran

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 51.910.379.231,- realisasi keuangan sebesar Rp. 48.302.000.781,- (93%) .



Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	7,69	47,09	612,4%	196%	-	-	
2	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	78,19	92,44	118%	96%	-	-	
	Rata-Rata Capaian			365%	96%	0%	0%	

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk indikator persentase pengurangan luas permukiman kumuh terealisasi pada tahun 2022 sebesar 47,09 atau 612 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,69.

Sedangkan untuk indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni terealisasi sebesar 92.44 atau 96 % dari target sebesar 78.19 %.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 indikator persentase pengurangan luas permukiman kumuh sebesar 42,81 % atau 196 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 21,81 %. Sedangkan untuk indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni terealisasi sebesar 77,21 atau 96 % dari target sebesar 80,24 %.

Untuk memperoleh informasi terkait realisasi pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni, diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dan Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni. perumahan dan permukiman layak huni, sebagai berikut :

a. Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh

Persentase Pengurangan Luas Pemukiman Kumuh dihitung dengan rumus:

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh =	$\frac{\text{Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (Kumulatif)}}{\text{Total Luasan Kawasan Permukiman Kumuh}} \times 100\%$
---	---



Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan menggunakan indikator/kriteria kumuh yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR, telah ditetapkan kawasan permukiman kumuh di Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman pada tahun 2014 dan diperbaharui kembali pada tahun 2020. Dari SK Walikota Pariaman Nomor : 444/050/2014 tahun 2014 terdapat luasan kawasan kumuh yaitu seluas 109,41 Ha.

Penanganan pada kawasan permukiman kumuh telah dilakukan mulai tahun 2017 – 2019, yaitu seluas 76,99 Ha atau 70,37 % dari total luas kawasan kumuh yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan pada 4 (empat) Kecamatan se-Kota Pariaman, dan menyisakan kawasan permukiman kumuh seluas 32,42 Ha, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 2019

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama kawasan	Luas/ Ha	Keterangan Pengurangan Kumuh				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Pariaman Tengah	Kampung Perak	Kampung Perak	7,23					
2		Pondok Duo							
3		Ujung Batung	Ujung Batung	24		9,6			
4		Rel Kereta Api				2,8			
5		Lohong	Kampung Kaliang	8,67		0,66			
6		Karan Aur	Karan Aur	7,62		8,06			
7		Pasir	Pasir	3,19	1,21				
8	Pariaman Selatan	BalaiKuraitaji	Pasar Kuraitaji	5,42		2,71			
9	Pariaman Selatan	Taluk	Pasir Sikadondong	32,99		11			
10	Pariaman Utara	Marunggi				25,44			
11		Pasir Sunur		0,15	3,17				
12		Naras Hilir	Naras	20,37			4,92		
13		Naras 1					4,74		
14	Balai Naras				2,3	0,23			
		JUMLAH		109,41	1,36	65,74	9,89		
		SISA KUMUH 2020		32,42		76,99			

Sumber : Korkot KOTAKU Pariaman (2022)

Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 70,37 % :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2019 =	$\frac{76,99}{109,41} \times 100\% = 70,37\%$
--	---

Pada tahun 2020, kembali dilakukan pendataan ulang karena terindikasi adanya potensi lokasi kawasan kumuh baru, sehingga menambah



luasan kawasan kumuh yang ditangani berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 277/050/2020 tahun 2020 adalah 184,36 Ha.

Dengan demikian total Luas kawasan kumuh yang akan ditangani adalah akumulasi luas kawasan kumuh hingga tahun 2019 (sesuai SK tahun 2014) yaitu 109,41 Ha ditambah luas kawasan kumuh baru (sesuai SK tahun 2020) yaitu seluas 184,36 Ha, dikurangi dengan sisa luas penanganan hingga tahun 2019 seluas 32,42 Ha), sehingga diperoleh total luas kawasan kumuh pada tahun 2020 yaitu 261,35 Ha.

Kawasan kumuh yang ditetapkan tahun 2020 berada di 16 lokasi baru yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan ditambah 6 lokasi lama sesuai SK Lokasi Kawasan Kumuh yang ditetapkan tahun 2014, sebagaimana tabel lokasi kawasan kumuh tahun 2020 berikut :

Tabel. 3.25
Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama kawasan	Luas/Ha	PENGURANGAN KUMUH	
					2020	2021
1	Pariaman Utara	Balai Naras	Kawasan Naras	6.60 Ha	6,6	
2	Pariaman Utara	Tungka Selatan Sikapak Barat	Kawasan Tungka	10,84		
3	Pariaman Utara	Manggung	Kawasan Manggung	13,4		
4	Pariaman Utara dan Pariaman Tengah	Ampalu	Kawasan Pauh barat- Ampalu	11,83		
		Apar				
		Pauh Barat		13,22		
5	Pariaman Tengah	Cimparuah	Kawasan cimparuah	19,62		
6	Pariaman Tengah	Jati hilir	Kawasan Jati	6,51		
7	Pariaman Tengah	Kampung Pondok	Kawasan Pondok	3,63		
8	Pariaman Tengah	Jawi-Jawi 1 Jawi-Jawi 2	Kawasan Jawi-Jawi	14.15		1,92
9	Pariaman Tengah	Karan Aur Kp Perak Lohong Pasir Pondok 2	Kawasan Pasie lohong dan sekitar	26,36		26,36
10	Pariaman Selatan	Palak Aneh	Kawasan Palak Aneh	12,81		
11	Pariaman Selatan	Pauh Kuraitaji	Kawasan Kuraitaji	7,08		
12	Pariaman Selatan	Punggung lading	Kaw Punggung lading	19,73		
13	Pariaman Timur	Kp Baru Padusunan	Kawasan padusunan	12,02		
14	Pariaman Selatan	Sungai Sirah	Kawasan Sungai Sirah	6,56		
		JUMLAH		184,36	6,6	28,28
		PENGURANGAN KUMUH		34,88	19%	
		SISA KUMUH 2022-2024		149,48	81%	

Sumber : Korkot KOTAKU Pariaman (2022)



Sedangkan total penanganan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah seluas 6,6 Ha, dengan lokasi penanganan pada kawasan kumuh Naras berada di Desa Balai Naras. Sehingga akumulasi penanganan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 76,99 Ha + 6,6 Ha yaitu sebesar 83,59 Ha. Dengan demikian Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai tahun 2020 adalah sebesar 31,98 % :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2020 =	$\frac{(76,99 + 6,6)}{261,35} \times 100\% = 31,98 \%$
--	--

Begitu juga dengan penanganan pada tahun 2021, dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 28,28 Ha, sehingga total luas penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2021 adalah akumulasi penanganan 76,99 Ha + 6,6 Ha + 28,28 Ha, dengan total seluas 111,87 Ha. Dengan demikian persentase pengurangan luas pemukiman kumuh hingga tahun 2021 adalah sebesar 42,80 %.

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2021 =	$\frac{(76,99 + 6,6 + 28,28)}{261,35} \times 100\% = 42,80 \%$
--	--

Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan untuk ditangani adalah seluas 13,22 Ha, namun target ini tidak dapat terealisasi seluruhnya, karena adanya kebijakan untuk efisiensi anggaran paca Pandemi Covid-19. Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan kumuh Kota Pariaman nomor 600/1574/DISPEKIM-LH/2022 ditetapkan pengurangan sebesar 11,19 Ha dari Luasan kumuh berdasarkan SK No. 38/050/2022 dengan total luasan kumuh seluas 261,35Ha

Adapun kawasan kumuh yang ditangani adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Nama Lokasi Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Yang ditangani (Ha)
1	Pariaman Tengah	Kel. Jati Hilir	3,63
		Kelurahan Kampung	1,6
		Kel. Jawi-Jawi I	2,34
		Kel. Jawi-Jawi II	3,62
Jumlah			11,19

Dengan demikian pengurangan luas kawasan kumuh tahun 2022 seluas 11,19 Ha sehingga total luas penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2022 adalah akumulasi penanganan 111,87 Ha + 11,19 Ha, dengan total penanganan sampai tahun 2022 seluas 123,06 Ha. Dengan demikian persentase pengurangan luas pemukiman kumuh hingga tahun 2022 adalah sebesar 47,09 %.

:Penurunan Luas Permukiman Kumuh	=	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh(n) yang ditangani}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh}}$	X	100%
	=	$\frac{(111,87+11,19)}{261,35}$	X	100%
	=	47,09%		

Adapun Penanganan Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pariaman Tahun 2019-2022

Tahun	Luas Kumuh Total (Ha)	Penanganan (Ha)	Kumulatif Penanganan	% Kumulatif Penanganan	Sisa Kumuh (Ha)
2019	109,41	76,99	76,99	70,37	32,42
2020	261,35	6,6	83,59	31,98	177,76
2021	261,35	28,28	111,87	42,80	149,48
2022	261,35	11,19	123,06	47,09	138,29

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, antara lain:

1. adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui Kementerian PUPR yang memberikan fasilitasi pendanaan maupun pendampingan dalam pelaksanaan program.
2. kolaborasi penanganan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, meliputi program sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni,



proteksi dan penanganan bahaya kebakaran, dan kegiatan terkait lainnya. Begitu juga adanya kolaborasi pendanaan penanganan kawasan kumuh yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, program Bantuan Bedah Rumah bagi Masyarakat Miskin yang difasilitasi Dinas Sosial dengan sumber pendanaan melalui BASIGI (Badoncek dan Sedekah Pagi), Bantuan dari BAZNAS, Donatur Komunitas serta dari Corporate Social Responsibility (CSR).

3. Selain itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Pariaman terkait penggunaan dana desa untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, dalam bentuk kegiatan penyediaan/perbaikan fasilitas publik, meliputi pengelolaan sampah, perbaikan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan permukiman.

Faktor penghambat, yaitu adanya efesiensi anggaran 2022 akibat pasca covid, sehingga berdampak terhadap beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

b. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Sedangkan terkait indikator Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dilakukan pengukuran berdasarkan basis data jumlah rumah tahun 2018 yaitu sebanyak 17.748 unit rumah dikurang jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 3.403 unit (KOTAKU, 2020), sehingga diperoleh jumlah rumah layak huni yaitu sebanyak 14.345 unit. Dari jumlah rumah yang layak huni tersebut dilakukan pengukuran kembali tidak hanya didasarkan kepada variabel kondisi rumah yang layak huni, tetapi juga mempertimbangkan akses dan kondisi ketersediaan air minum yang layak serta sanitasi yang layak dan aman. Adapun capaian berdasarkan variabel dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Capaian Variabel Pembentuk Indikator Perumahan
Permukiman Layak Huni

Tahun	% Akses Sanitasi Layak Aman	% Akses Air Minum Layak	% Perumahan Layak Huni
2022	54,98	91,80	92,44
2021	52,59	91,10	87,95
2020	48,87	89,43	87,67
2019	48,33	88,75	87,11

Sumber : Dinas Perkim LH (2022)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian persentase masing-masing variabel pembentuk indikator Perumahan Permukiman Layak Huni mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

➤ Sanitasi Layak dan Aman

- a. Akses sanitasi layak ini terdiri dari akses layak dan akses aman, dimana Jumlah rumah yang mempunyai akses layak sebanyak 9.805 unit dan jumlah rumah yang berakses sanitasi aman sebanyak 2.097 unit.
- b. Tahun 2022 Pembangunan Tangki Septik Individual melalui dana Hibah Air Limbah Sanitasi (ALS) dari Kemeterian PUPR dilaksanakan pada 26 Desa yang tersebar di 3 Kecamatan dengan total rencana Pembangunan sebanyak 500 Unit/SR, realisasinya 494 unit/SR. Selain itu juga dilakukan Pembangunan Tangki Septik Komunal Melalui dana DAK Sanitasi yaitu Pembangunan 5 Unit Tangki Septik Komunal di Desa Simpang dan 5 Unit di Kelurahan Jalan Kereta Api dengan total 50 SR, dengan realisasinya 53 SR, sehingga total realisasi dari 550 SR target adalah 547 SR. dengan penambahan 547 unit tersebut maka menaikkan jumlah Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi layak dan aman sebesar 11.902 RT dari 17.748 Unit rumah di Kota Pariaman.

Tahun 2022, rumah yang sudah terlayani akses sanitasi layak sebanyak 7.660 (43,16%) dan akses sanitasi aman sebanyak 2.097 Unit (11,82%) dari 17.748 unit jumlah total rumah di kota pariaman,



sehingga realisasi persentase akses sanitasi layak dan amana hanya sebesar 54,98 persen.

➤ Akses Air Minum Layak

- a. Rumah Tangga yang sudah mendapatkan akses air minum layak sebanyak 16.293 unit (dengan asumsi satu RT ada 5 orang) atau 91,80% dari jumlah rumah keseluruhan 17.748 Unit.
- b. Konsep yang digunakan untuk rumah tangga yang sudah dapat akses air minum layak mengacu kepada metadata (Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air yang terlindungi, air perpipaan dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

➤ Perumahan layak Huni

- Pada awal tahun 2018 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan kumuh adalah 1527 Unit dan di luar kawasan kumuh sebanyak 1.876 Unit. Sehingga total RTLH menjadi 3.403 Unit dan jumlah Rumah Layak Huni (RLH) sebanya 14.345 Unit. Pada tahun 2018 ini dilakukan penanganan RTLH sebanyak 600 Unit melalui program DAK perumahan (APBN) Sebanyak 359 Unit dan Program BSPS (Provinsi) sebanyak 241 Unit sehingga jumlah RLH meningkat menjadi 14.945 (84,21%) dari total rumah.
- Awal tahun 2019, kondisi awal rumah tidak layak huni sebanyak 1527 unit atau 8,6% dari total jumlah rumah sebanyak 17.748. Rencana awal target tahun 2019 untuk penanganan rumah tidak layak huni adalah sebesar 750 unit yang terdiri dari program BSPS dan DAK perumahan swadaya. Dalam waktu berjalan program BSPS terjadi penambahan kuota menjadi 1000 unit dan dari DAK tetap 150 unit sehingga total realisasi pada tahun 2019 menjadi 1.150 unit rumah untuk peningkatan kualitas. Ini juga menunjukkan perbaikan kinerja terhadap penurunan rumah tidak layak huni menjadi 2,12 % dan peningkatan RLH menjadi 16.095 (90,69%).



- Pada tahun 2020 di target perbaikan RTLH sebanyak 100 unit, target ini ditetapkan sesuai kondisi dan situasi yang masih dalam kondisi pandemi, dan target ini bisa diselesaikan sebanyak 104 unit, sehingga kondisi rumah tidak layak huni sudah berkurang menjadi 1,54% dari total target yang ditetapkan dan RLH meningkat menjadi 16.199 (91,27%).
- Tahun 2021 Target yang akan di capai sebanyak 92 Unit (1,02%) dan ini bisa diselesaikan semua dan RLH meningkat lagi menjadi 16.291 (91,79%).
- Tahun 2022 selain melalui melalui program DAK Perumahan (Dana APBN) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ada tambahan 5 Unit lagi pengerjaan RTLH dari Baznas sehingga total rumah yang dikerjakan menjadi 116 Unit. Jika dibandingkan dengan target yang diberikan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mampu melaksanakan 58% dari target yang diberikan. RLh meningkat menjadi 16.407 (92,44%)
- Total RTLH yang ditangani dari tahun 2018-2022 adalah 2.062Unit dari total 3.403 RTLH di Kota Pariaman, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Tahun	Total Rumah (unit)	Total RTLH (unit)	RTLH Ditangani (unit)	Kumulatif RTLH Ditangani (unit)	RLH	(%)Rumah Layak Huni
1	2018	17.748	3.403	600	600	14.945	84,21%
2	2019	17.748	2.803	1.150	1.750	16.095	90,69%
3	2020	17.748	1.653	104	1.854	16.199	91,27%
4	2021	17.748	1.549	92	1.946	16.291	91,79%
5	2022	17.748	1.457	116	2.062	16.407	92,44%
6	2023	17.748	1.341	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perkim LH (2022)

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
% Pengurangan luas Permukiman Kumuh	%	51,49	-	-	21,81	7,69	-	-	42,81	47,09
%Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	83,33	-	-	80,24	78,2	-	-	77,21	92,44

Sumber : Hasil Olahan (2022)

Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,60	56,35	89%	93%	110%	73%	
	Rata-Rata Capaian			89%	93%	110%	73%	

Dari tabel sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKH) dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan dengan target 63,60 berdasarkan hasil Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman 56,35 (kategori sedang) dengan Capaian 89%.

Indeks Kualitas Lingkungan dihitung dari Indeks Pemantauan Kualitas Lingkungan, Indeks Pemantauan Kualitas Udara, dan Indeks Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan.

Dengan angka IKH 56,35 (kategori sedang) Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman sedikit lebih tinggi 1,42, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 IKH 54,93, tahun 2020 IKH 60,29 sedangkan ditahun 2019 IKH 47,24.

IKLH dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana rendahnya nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2022 disebabkan oleh rendah nilai IKA yaitu 33,33



dengan target 55,89 dan nilai IKL sebesar 24,24 dengan target 26,19, dan nilai IKU sebesar 95,09.

Selain tidak mencapai target yang telah ditetapkan, nilai IKA Kota Pariaman Tahun 2022 juga mengalami penurunan dari tahun 2021, dimana nilai IKA tahun 2021 yaitu sebesar 34,80. Nilai IKA dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai dan talao Kota Pariaman yang dilakukan 2 kali dalam setahun pada 4 sungai (Batang Pariaman, Batang Pampan, Batang Mangau dan Batang Manggung) dan 6 talao (Talao Pauh, Mangrove Mati, Manggung, Padang Birik-Birik, Karan Aur dan Apar). Rendahnya nilai IKA Kota Pariaman pada tahun 2022 ini disebabkan sebagai berikut :

- a. Beban pencemaran sungai tidak hanya berasal dari sumber pencemar di Kota Pariaman, namun juga dari Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan karena sungai yang mengalir di Kota Pariaman berhulu di Kabupaten Padang Pariaman, dan sungai tersebut telah tercemar sebelum memasuki wilayah Kota Pariaman.
- b. Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan dengan upaya penurunan beban pencemaran terutama terkait penurunan beban pencemaran dari kegiatan rumah tangga.
- c. Izin pembuangan limbah usaha dan/atau kegiatan belum efektif karena belum mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran.
- d. Secara umum upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilakukan belum maksimal dan efektif dalam menurunkan beban pencemaran sampai tingkat yang memadai.

Selain IKA, komponen lain yang menyebabkan tidak tercapainya target nilai IKLH adalah IKL. Nilai IKL Kota Pariaman Tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2021 yaitu 22,92, maka nilai IKL Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kualitas lahan Kota Pariaman sebesar 1,32 point. IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan



lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam suatu wilayah.

Kota Pariaman tidak memiliki hutan, sehingga IKL Kota Pariaman dihitung dari luas RTH yang memiliki vegetasi yang menutupi lahan RTH tersebut (tutupan vegetasi non hutan), karena tidak semua RTH di Kota Pariaman yang memiliki tutupan vegetasi. Penghitungan IKL dilakukan dengan mendeliniasi RTH tersebut menggunakan *Google Earth* yang kemudian diinput pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana total luas RTH yang terhitung adalah 110,73 Ha. RTH yang dideliniasi tidak hanya RTH *Publik* tetapi juga RTH *Privat*, karena mulai tahun 2022 ini RTH *Privat* diperbolehkan masuk dalam hitungan IKL, hal ini juga yang menyebabkan nilai IKL meningkat dari tahun 2021. Selain menambah luasan RTH, upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan nilai IKL Kota Pariaman adalah dengan meningkatkan kualitas RTH dengan penambahan vegetasi sehingga memiliki tutupan vegetasi.

Target Indeks Kualitas Lingkungan Kota Pariaman pada RPJMD tahun 2021 sebesar 63,3 ***namun target ini tidak dapat tercapai, disebabkan karena:***

- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan sehingga pembelian reagen, alat laboratorium dan kalibrasi alat yang diperlukan untuk melakukan analisa parameter tidak mencukupi.
- Jumlah titik pengambilan sampel sangat terbatas karena keterbatasan anggaran, sehingga pemantauan kualitas air tidak dapat dilakukan secara maksimal
- Terbatasnya SDM untuk menganalisa sampel air permukaan Tidak tersedianya sarana transportasi untuk mencapai lokasi titik pengambilan sampel air permukaan.
- Nilai IKA Kota Pariaman tahun 2019 tidak bisa dicapai sesuai target IKA tahun 2019 yaitu 43. Karena untuk mendapatkan nilai IKA Kota Pariaman, pemantauan dalam setahun dilakukan maksimal 5 kali pemantauan dengan 7 parameter wajib, seperti DO, BOD, COD, pospat, total coli, e-coli dan TSS



- frekuensi pengujian sampel ideal dilakukan 5 kali dalam 1 tahun, tetapi yang dapat dilakukan pada tahun 2018 hanya 2 kali 1 tahun.
- Efisiensi sumber daya manusia untuk pencapaian indikator kinerja Indeks lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup ini melibatkan Bidang P2KLH sebanyak 5 orang PNS dan UPT. Laboratorium Lingkungan (sebanyak 8 orang PNS dan tenaga honor sebanyak 12 orang).

Solusinya yang dapat ditempuh untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

- Untuk kelengkapan sarana prasarana perlu dukungan dana DAK dan APBN diusulkan pada tahun berikutnya.
- Untuk efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2021, diharapkan pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.
- Meskipun demikian untuk indeks kualitas air Kota Pariaman dengan angka 34,8 tersebut masih belum memenuhi baku mutu.
- Dalam mewujudkan indikator kinerja dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan dengan target akhir RPJMD 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN					REALISASI			
	AKHIR RPJM	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan	64,06	64,42	55	59,10	63,60	47,2	60,29 (Kurang)	54,93 (Waspada)	56,35 (Kategori Sedang)

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Regional;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Pengembangan Permukiman;
- 4) Program Pengembangan Perumahan;
- 5) Program Kawasan Permukiman;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.;



- 7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 9) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 10) Program Permbinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 11) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- 12) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 13) Program Pengelolaan Persampahan
- 14) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang dialokasikan untuk 2 sasaran ini, yaitu sasaran Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni, dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan adalah sebesar Rp. 22.738.744.088,- dengan realisasi Rp. 21.767.463.516,- atau 95,7%.

Sasaran 4 Meningkatnya Mitigasi Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun			
						2022	2021	2020	2019
1	Indeks Resiko Bencana	171	Tinggi	171,20	Tinggi	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian					100%	100%	100%	100%

Indonesia yang terletak dikawasan Cincin Api Pasifik memang memiliki potensi alam yang tinggi, dimana Indonesi tidak henti-hentinya ditimpa musibah bencana, baik itu gempa, tanah longsor, banjir, tsunami maupun gunung meletus. Provinsi Sumatera Barat berada diantara dua lempeng besar (Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo Australia) dan Patahan Semangko. Didekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah Seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa,



Wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahun gempa besar yang pada awal abad 21 telah memasuki masa berulangnya siklus.

Kota Pariaman salah satu Kota di Sumatera Barat yang terletak didaerah pantai dan merupakan daerah zona merah bencana alam karena letak Geografis Kota Pariaman yang memanjang di sepanjang Pantai Barat Sumatera yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Gempa yang terjadi di tahun 30 September 2009 yang berkekuatan 7.6 skala richter yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari bencana tersebut.

Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana .

Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena :

- 1) bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan;
- 2) kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh;
- 3) pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Daerah merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.

Komponen penyusun indeks resiko bencana terdiri atas tiga komponen yaitu indeks kapasitas, kerentanan dan ancaman. Oleh karenanya dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya indeks resiko bencana di daerah.

Dari Indeks Ketahanan Daerah, maka Kota Pariaman mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk menurunkan resiko.



Kota Pariaman mempunyai 10 potensi terhadap ancaman bencana seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, penyakit epidemik, kebakaran lahan dan perumahan serta kegagalan teknologi.

Dari 10 potensi bencana yang ada tersebut, yang paling besar risikonya adalah gempa bumi dan tsunami, karena menimbulkan kerusakan yang cukup besar, untuk itu kita perlu memperbanyak tanaman di sepanjang pantai Pariaman, seperti pohon pinago, kelapa dan lainnya sehingga dapat meminimalisasi dampak tsunami apabila terjadi di Kota Pariaman.

Kota Pariaman berada di zona merah kawasan rawan bencana. “Untuk itu Pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan diri dalam menghadapi bencana. Baik prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana.”

Kota Pariaman telah membentuk 71 KSB (Kelompok Siaga Bencana) di 71 desa/kelurahan. Juga punya beberapa desa tangguh bencana, serta melatih dan membentuk KSBS (kelompok Siaga Bencana Sekolah).

Adapun bencana alam yang terjadi pada tahun 2022 berjumlah 53 bencana, dimana 49 pohon tumbang, 2 pasang, 1 kebakaran, dan 1 bencana lainnya.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menaggulangi resiko bencana, yaitu: pembuatan peta rawan dan peta resiko antara lain:

- 1) mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki resiko tinggi terjadinya bencana alam, dan
- 2) mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi wilayah untuk selanjutnya melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah.

Indeks Ketahanan Daerah dapat diukur dengan 71 indikator yang tertuang dalam 6 kegiatan yaitu, penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, kawasan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Resiko Bencana	Kategori	171	171	171	171	171	171	171	171,2	171,2

Adapun alokasi Anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 3.393.498.056,- dengan realisasi Rp. 3.123.313.651,- (92,04%).

Program yang mendukung sasaran ini:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 3) Program Penanganan Bencana

Sasaran 5 **Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman Dalam Kehidupan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2022	2021	2020
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	68,5	84,40	123%	95%	-
	Rata-rata capaian			123%	95%	-

Sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan terdapat satu Indikator, yaitu Indeks Ketentraman dan Ketertiban target 66,7 realisasi 60 dengan capaian 96%.

Capaian Sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan indikator Ketentraman dan Ketertiban ini tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2019, Sasaran dan Indikator ini merupakan perubahan dari Sasaran Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial dengan



Indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban, variabel penghitungannya berbeda.

Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian dan tingkat ketentraman dan ketertiban. Indeks ini dapat dihitung dengan menganalisis beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap Penegakan Ketentraman dan Ketertiban, dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	=	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Target Kasus K3 yang terjadi}}$	X	30%
2.	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	=	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yg ditangani}}{\text{Target gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi}}$	X	30%
3.	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	=	$\frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}}$	X	20%
4.	Persentase desa/kelurahan yg melaksanakan perlindungan masyarakat	=	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}$	X	20%

1) Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang Diselesaikan

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan razia pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah, razia warnet, razia IMB dan kegiatan lain yang menyangkut Perda K3. Kegiatan penertiban dilakukan untuk penegakan Perda K3 seperti penertiban PKL, IMB, Orgen Tunggal (didalam Perda Kota Pariaman Orgen Tunggal yang main di malam hari hanya diperbolehkan sampai pukul 00.00 WIB, pakaian biduanitanya harus sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah Kota Pariaman), dan kegiatan lain yang berhubungan dengan K3. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol.PP.



Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS Perda yang ada 11 Peraturan Daerah yang ditegakkan, 11 Perda dilaksanakan penegakkannya.

Pada tahun 2022 output jumlah Kasus yang ditangani secara yustisi terletak pada realisasi kegiatan wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Yustisi, yaitu penyelesaian yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Jadi penyelesaian kasus pelanggaran Perda dengan keputusan Hakim. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 0 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 3 kasus. Hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional sehingga tidak semua kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan yustisi.

Output jumlah kasus non yustisi ini didapat dari kegiatan penyelesaian pelanggaran perda secara non yustisi, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Non Yustisi, yaitu berupa pembinaan dan mediasi terhadap personil pelanggar Perda yang diselesaikan dengan keputusan Kepala Satpol. PP saja. Kegiatan ini lebih diutamakan pelaksanaannya daripada yustisi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 142 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 150 kasus. Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus pelanggaran Perda yang harus diselesaikan secara Non Yustisi.

Capaian Sub Indikator 1

$$\text{Sub Indikator 1} = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Target Kasus K3 yang terjadi}} \times 30\%$$

$$\text{Sub Indikator 1. } (38/50) \times 30\% = 23\%$$

2) Jumlah Kasus Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Output Jumlah Kasus Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara



langsung terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, paling banyak pelanggaran meliputi Perda 10 Tahun 2013 tentang Penyakit masarakat, Perda 10 Tahun 2018 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, serta Perda Prov Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Prokes Covid 19.

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan maksiat. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol.PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS..

$$\text{Sub Indikator 2} = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yg ditangani}}{\text{Target gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi}} \times 30\%$$

$$\text{Sub Indikator 2.} = 142 / 150 * 30 \% = 11.67 \%$$

3) Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Eksistensi satuan polisi pamong praja (satpol pp) merupakan salah satu kekuatan terdepan yang diandalkan sebagai perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku, satuan polisi pamong praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman telah memberikan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas bagi para anggota Satpol PP. Bimtek ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2018 s/d 2021 di Secata Padang Panjang bagi ASN dan di Kota Pariaman bagi Banpol PP,



sebanyak 28 orang ASN dari 55 orang sudah mengikuti pendidikan dasar pol pp, pengamanan VIP, pelatihan kebencanaan, Informan, dan penyidik, dan sebanyak 127 orang Non ASN yang tergabung dalam Banpol PP sudah mengikuti latihan dasar Pol.PP. dari didalam pelaksanaan bimteknya ada beberapa materi yang disampaikan. Diantaranya, tentang peran Linmas dan Satpol PP, mekanisme dan prosedur tindakan represif non yustisial, tehnik komunikasi, negoisasi dan mediasi penanganan unjuk rasa, SOP penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dengan bekal yang diberikan, para anggota Satpol PP bisa meningkatkan pengetahuannya, lebih trampil dan lebih professional. Namun ditahun 2022 karena anggaran devisit, maka untuk peningkatan kapasitas pol PP diadakan secara internal.,

Capaian Sub Indikator 3.

$$\text{Sub Indikator 3.} = \frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}} \times 20\%$$

$$\text{Sub Indikator 3.} = 155 / 232 * 20 \% = 13 \%$$

4) Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat, pada desa dan kelurahan di Kota Pariaman memakai istilah Dubalang (bahasa daerah), satuan perlindungan masyarakat/dubalang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan yang terdiri dari 71 desa dan kelurahan.



Capaian Sub Indikator 4.

$$\text{Sub Indikator 4} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 20\%$$

Sub Indikator 4. = 71 / 71 * 20 % = 20 %

Hasil Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK) :

Sub Indikator 1 + Sub Indikator 2 + Sub Indikator 3 + Sub Indikator 4.

Hasil IKK : 23 + 28 + 13 + 20,00 = 84.4

Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan
Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	70,4	-	-	66,7	68,5	-	-	63,49 (95%)	84,4

Dari Perbandingan realisasi ini dapat dilihat, bahwa target diakhir RPJMD Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah 70,4 sedangkan realisasi tahun 2022 baru 84,4 telah melampaui target sebesar 6,91.

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 3) Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Piolitik
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Anggaran untuk mendukung sasaran ini Rp. 4.152.700.858,- dengan realisasi Rp. 3.814.274.907,- (91,85%)



MISI V: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Lokal

Sasaran 1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2019	2018
1	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,43%	15,45%	100,1%	66%	-	-
	Rata-rata capaian			100,1%	66%	-	-

Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan indikator % Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target 15,43 terealisasi 15,45% dengan capaian 100,1%,

Defenisi operasional persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah Perbandingan Jumlah Kontribusi dari Sektor Perdagangan dibagi dengan total PDRB di kali 100 %.

Kontribusi dari Sektor Perdagangan terhadap PDRB Pariaman yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pariaman, sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan PDRB Kota Pariaman selain sektor pertanian dan sektor konstruksi.

Tahun 2022 sektor perdagangan menyumbang 15,45 % dari total PDRB Kota Pariaman. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021) angka ini sedikit mengalami peningkatan 0,55 dari tahun 2021 dimana realisasi hanya 14,90%.

Kenaikan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB disebabkan perekonomian masyarakat berangsur membaik pasca pandemi covid 19.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan sektor perdagangan:

1. melakukan operasi pasar;
2. pemberian bantuan sarana dan prasarana perdagangan kepada pelaku usaha;



3. pemberian bantuan modal;
4. memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi UMKM dan IKM;
5. membantu pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Dampak dari Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman kepada para pelaku usaha secara riil cukup memberikan pengaruh yang signifikan.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,59	-	-	22,5	15,43	-	-	14,90	15,45

Program yang mendukung sasaran ini, antara lain:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dengan jumlah Anggaran Rp. 3.070.443.459,- dengan realisasi Rp. 2.850.276.371,-



Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2020	2019
1	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,57%	17,93%	97%	97%	-	-
Rata-rata capaian				97%	97%	-	-

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan indikator Parsentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan target 18,5% terealisasi 17,93% dengan capaian 97%.

Pencapaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 17,93% dari keseluruhan PDRB Kota Pariaman tahun 2021 menjadikan sektor pertanian penyumbang PDRB terbesar dari pada sektor lainnya. Sumber data yang sama menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Pariaman sudah bertahan selama tiga tahun terakhir.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Pariaman masih didominasi pertanian. Hal ini juga didukung dengan banyaknya kegiatan yang mendukung pertanian ini yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing bidang ini juga memiliki kegiatan yang beragam. Selain itu kontribusi Pertanian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pertanian tidak terlalu berdampak terhadap adanya covid 19 hal ini ditunjukkan selama tiga tahun terakhir produksi stabil dan tetap menjadi penyumbang PDRB terbesar.

Adapun perbandingan Data Produksi Pertanian Tahun 2020 -2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.35
Data Produksi Pertanian Tahun 2020-2022

NO	KOMODITI PERTANIAN	REALISASI		
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Produksi Padi (ton)	26.799	25.180	26.092
2.	Produksi Kelapa (ton)	2.694,17	2.870	3.057,66
3.	Produksi Cabe (ton)	2.694,17	2.870	3.057,66
4.	Produksi Perikanan (ton)	6.206	6.230	6.658,61
5.	PETERNAKAN (ton)	633.078	533.731	538.261

Dari 5 komponen pendukung capaian produksi pertanian capaian produksi tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian produksi dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Walaupun ada sebagian komponen yang mengalami fluktuasi capaian produksinya namun bisa diimbangi oleh capaian produksi capaian komponen lainnya.

Capaian produksi cabe, perikanan dan peternakan diimbangi capaian produksi padi dan kelapa sehingga capaian produksi sektor pertanian tidak terpengaruh secara signifikan.

Penyebab tidak tercapainya target adalah:

1. Produksi Pertanian Khususnya Padi

produksi padi dari Tahun 2020 - 2022 terjadi fluktuasi produksi, dimana tahun 2022 produksi padi naik sebanyak 912 ton dari produksi tahun 2021, sedangkan di tahun 2021 produksi padi turun sebanyak 1.619 ton dari tahun 2020.

Terjadinya kenaikan produksi padi, disebabkan :

- 1) adanya gerakan pengendalian hama;
- 2) penerapan teknologi, intensifikasi pertanian serta program penyuluhan.

2. Produksi Kelapa

Produksi **kelapa** sebagai salah satu komoditi unggulan pada perkebunan juga mengalami lonjakan produksi yang cukup signifikan sebesar 3.057,66 ton .

3. Produksi Cabe



Pada sektor Hortikultura juga terjadi peningkatan yang signifikan, dimana **cabe** sebagai produk unggulan dari hortikultura dengan produksi sebesar 1534,15 kwintal Hal ini disebabkan oleh minat petani cabe meningkat dengan adanya bibit unggul dan pencatatan produksi cabe lebih baik dari tahun sebelumnya

4. Produksi Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari dua komponen yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap belum mencapai target sedangkan untuk perikanan budidaya dapat dicapai.

Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca yang ekstrim, dan juga sarana dan prasarana penangkapan serta sumberdaya ikan di perairan Kota Pariaman. Keterbatasan alat penangkapan dan populasi ikan yang sudah mulai menurun menyebabkan produksi perikanan tangkap cenderung tetap.

Keberhasilan produksi perikanan budidaya didukung dengan penyuluhan yang selalu mendampingi setiap kegiatan budidaya serta didukung juga kegiatan restocking perairan air tawar.

Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan mengusakan pemenuhan alat tangkap yang baik dan usulan penanaman rumput buatan.

5. Produksi Peternakan

produksi daging khususnya sapi pada tahun ini ditarget produksnyai sebesar 691,40 ton hanya terealisasi sebesar 538,26 ton saja .

Tidak tercapainya hasil produksi ini sebagian besar disebabkan:

- 1) adanya wabah penyakit yang menyerang ternak. Sehingga ada beberapa ternak yang mati dan adanya kekhawatiran dari ternak yang akan dipotong terjangkit penyakit yaitu penyakit mulut dan kuku.
- 2) Dengan penyakit mulut dan kuku, menimbulkan kekhawatiran masyarakat, menurunnya keinginan masyarakat membeli daging sehingga pemotongan juga menurun.



Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran ini adalah:

- Gerakan Pengendalian Hama
- Pemberian Bantuan Pestisida
- Pergantian varietas bibit dari 42 ke bujang marantau
- penyuluhan kepada para petani dalam kegiatan pasca panen.
- mendampingi setiap kegiatan budidaya; serta
- peningkatan usaha restocking perairan air tawar.

Tabel 3.36

**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap	%	18,67	-	-	22,5	18,57	-	-	14,90	14,90

Program yang mendukung sasaran ini, antara lain:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. Program Pengelolaan Ikan Tangkap.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya.
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
11. Program Penyuluhan Pertanian
12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran ini berjumlah Rp. 8.266.804.472,- dengan realisasi Rp. 7.309.889.520,- (88,42%)



Sasaran 3 Meningkatnya Investasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2020	2019
1	%pertumbuhan Investasi	1,85	0,73	39%	-1100%	49%	1067%
Rata-rata capaian				39%	-1100%	49%	1067%

Dari tabel sasaran Meningkatnya investasi dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Investasi target 1,85 dengan realisasi 0,73 dengan capaian 39%. Capaian ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana target 1,7% realisasi -18% .

Adapun angka realisasi didapat dari:

Nilai investasi yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 42.000.000.000,- per 31 Desember 2022 diambil secara online melalui aplikasi OSS baik secara pelaporan LKPM manual dengan realisasi Rp. 58.779.773.706,- sedangkan realisasi Tahun 2021 Rp. 34.032.497.591,-

$$\begin{aligned} & \text{Input Manual} + \text{Input Sistem Oss.go.id} \\ & = \text{Rp } 27.925.000.000,- + 30.854.773.706,- \\ & = \text{Rp } \mathbf{58.779.773.706,-} \end{aligned}$$

Maka formulasi perhitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun 2022} - \text{Realisasi investasi tahun 2021}}{\text{Realisasi investasi tahun 2021}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 58.779.773.706 - \text{Rp.} 34.032.497.591}{\text{Rp.} 34.032.497.591,-} \times 100 \% = \mathbf{0,73}$$

Perbandingan mulai dari tahun 2018-2022 realisasi dan pertumbuhan investasi cukup fluktuatif, dimana dari tahun 2018 ke 2019 pertumbuhan investasi sebesar 16%, tahun 2019 ke 2020 pertumbuhan investasi naik 79% sedangkan 2020 turun sangat tajam -18%., dan di tahun 2022 naik sangat tajam 73% hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37
Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2018-2022

TAHUN	REALISASI INVESTASI	PERSENTASE
2018	Rp 20.000.000.000	
2019	23.269.261.000	0,16
2020	41.544.050.000	0,79
2021	34.032.497.591	(0,18)
2022	58.779.773.706	0,73

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2019-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,0	0,03	0,5	3,5	1,85	0,16	0,79	-0,18	0,73

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini berjumlah Rp. 401.155.500,- dengan realisasi Rp. 378.115.350,- (94,88%) dengan Program ini diantaranya:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran 4 **Menurunnya Angka Kemiskinan**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2020	2019
1	Persentase Angka Kemiskinan	4,10	4,13	99%	112%	88%	99%
	Rata-rata Capaian			99%	112%	88%	99%

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan didukung 1 indikator, yaitu Persentase Angka Kemiskinan target 4,10 realisasi 4,13 dengan capaian 99%, realisasi dan capaian ini



kurang bagus, karena masih terdapat gap antara target dengan realisasi sebesar 0,03.

Perbandingan capaian Persentase Angka Kemiskinan dari Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39
Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman Tahun 2019-2022

NO	KOTA	Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman (Persen)			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
	<i>Kota Pariaman</i>	4,76	4,10	4,38	4,13

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lain-lain).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan. adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pariaman dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.40
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2019-2022

NO	KAB/KOTA	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat (Persen)			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Kota Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	2,28
2	Kota Solok	3,24	2,77	3,12	3,02
3	<i>Kota Pariaman</i>	<i>4,76</i>	<i>4,10</i>	<i>4,38</i>	<i>4,13</i>
4	Kab. Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26
5	Kota Padang	4,48	4,40	4,94	4,26
6	Kota Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46
7	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14
8	Kab. Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56
9	Kota Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66
10	Kab. Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00
11	Kabupaten Agam	6,75	6,75	6,85	6,22
12	Kab. Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25
13	Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59
14	Kab. Pasaman	7,21	7,16	7,48	6,85
15	Kab. Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93
16	Kab. Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51
17	Kab. Pesisir selatan	7,88	7,61	7,92	7,11
18	Kabupaten Solok	7,98	7,81	8,01	7,12
19	Kab. Kep. Mentawai	14,43	14,35	14,84	13,97
20	<i>Prov. Sumatera Barat</i>	<i>6,24</i>	<i>6,28</i>	<i>6,63</i>	<i>5,92</i>

Sumber Data BPS 2022 dan diolah

Dilihat dari tabel di atas Persentase Penduduk miskin di Kota Pariaman dari tahun 2019-2022 terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2019 persentase angka kemiskinan 4,76 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 420 ribu jiwa, tahun 2020 turun menjadi 4,10 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 366 ribu jiwa, tahun 2021 naik menjadi 4,38 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 399 ribu jiwa, dan tahun 2022 turun kembali menjadi 4,13 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 380 ribu jiwa.

Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.41
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2019-2022

NO	KAB/KOTA	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Kota Sawahlunto	1.35	1.36	1.52	1.47
2	Kota Solok	2.29	1.99	2.31	2.28
3	<i>Kota Pariaman</i>	<i>4.20</i>	<i>3.66</i>	<i>3.99</i>	<i>3.80</i>
4	Kab. Tanah Datar	16.20	15.34	15.89	14.91
5	Kota Padang	42.44	42.17	48.44	42.37
6	Kota Bukittinggi	6.75	6.01	6.98	6.16
7	Kota Padang Panjang	3.00	2.84	3.28	2.89
8	Kab.Dharmasraya	15.49	15.70	17.60	15.08
9	Kota Payakumbuh	7.68	7.74	8.66	8.08
10	Kab. Sijunjung	16.65	16.28	16.81	15.07
11	Kabupaten Agam	33.10	33.31	34.25	31.33
12	Kab.Padang Pariaman	29.48	28.98	30.41	26.44
13	Kab.Lima Puluh Kota	26.64	26.43	28.51	26.00
14	Kab. Pasaman	20.22	20.29	21.57	19.94
15	Kab.Pasaman Barat	31.53	31.64	34.97	32.91
16	Kab.Solok Selatan	12.49	12.39	13.41	11.81
17	Kab.Pesisir selatan	36.51	35.45	37.41	33.78
18	Kabupaten Solok	29.74	29.28	30.36	27.16
19	Kab. Kep. Mentawai	13.22	13.37	14.31	13.74
20	<i>Prov. Sumatera Barat</i>	<i>345.22</i>	<i>344.23</i>	<i>170.67</i>	<i>335.21</i>

Sumber Data BPS 2022

Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebagai kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil Survei Sosian Ekonomi (Susenas) 2021, jumlah penduduk miskin di kabupaten yang wilayah dikelilingi Samudera Hindia tersebut sebanyak 14,31 ribu jiwa (14,84%) dari total populasi. Secara persentase, angka kemiskinan di kabupaten tersebut meningkat dibanding Maret 2020 sebesar 14,35%.

Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Solok, yakni mencapai 8,01%. Diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka kemiskinan sebesar 7,92%, kemudian Kabupaten Solok Selatan sebesar 7,52%, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 7,51%.



Daerah lainnya yang memiliki angka kemiskinan tinggi di Sumbar, yaitu, Kabupaten Pasaman dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,48%, Kabupaten Lima Puluh Kota 7,29%, lalu Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,22%, serta Kabupaten Agam dan Kabupaten Sijunjung masing-masing sebesar 6,85% dan 6,8%.

Adapun permasalahan-permasalahan dalam hal pengurangan kemiskinan ini adalah:

- 1) Data kemiskinan secara nasional yang diakui adalah data dari Susenas. Tapi banyak OPd yang secara kegiatan terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan ini menggunakan data OPD itu sendiri. Padahal data yang digunakan oleh OPD itu banyak yang tidak memenuhi dari kriteria kemiskinan.
- 2) Belum maksimalnya penggunaan P-BDT(Basis Data Terpadu) yang dijadikan sebagai sasaranprogram penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD yang ada. Kondisi inilah TKPK selaku pelaksanadi Kota Pariaman berupaya untuk bisa menjelaskan kepada semua pihak, tentang cakupan dan hasilpengolahan Basis Data Terpadu tersebut. Sedangkan pada tahap perencanaan program selalumenanyakan tentang target sasaran yang akan dilaksanakan, sehingga diupayakan untuk menggunakan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- 3) Belum terintegrasinya lembaga-lembaga pelaksanaan program penanggulan kemiskinan di tingkatDesa/Kelurahan (BKM, KUBE, UPK, UEP, Desa Mandiri Pangan, Kotaku). Sehingga bantuan yangdiberikan pada kolompok masyarakat miskin belum merata.
- 4) Masih adanya kepentingan-kepentingan yang masih berpihak pada kelompok tertentu, sehingga untuksasaran masyarakat miskin belum berjalan maksimal.
- 5) Belum maksimalnya keterlibatan lembaga masyarakat/ keagamaan, dalam upaya penggunaan P-BDT sebagai basis data tunggal untuk

penanggulangan kemiskinan dalam pemberian bantuanpermodalan bagi fakir dan miskin seperti BAZ.

- 6) Partisipasi masyarakat yang kurang dalam program penanggulangan kemiskinan, sehingga pemberdayaanmasyarakat yang diharapkan berjalan tidak terlaksana, serta adanya anggapan bahwa untuk bantuanmodal usaha atau dana bergulir/revolving sebagai bantuan lepas tanpa adanya pengembalian, sehingga banyak terjadi kemacetan dana yang telah disalurkan selama ini.
- 7) Karakteristik rumah tangga miskin yang tidak mau merubah budaya miskin selalu ingin dibantu.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
% Angka Kemiskinan	%	3,50	4,80	4,65	3,90	4,10	4,76	4,10	4,38	4,13

Dari perbandingan realiasi dari sasaran Menurunnya angka kemiskinan dengan realisasi di tahun 2021 dengan angka 4,38 jika dibandingkan dengan akhir RPJMD terdapat selisih sekitar 0,88.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan melibatkan seluruh unsur baik unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat .

Anggaran yang yang mendukung sasaran menurunnya angka kemiskinan berkisar Rp. 63.628.430.250,- dengan realisasi Rp. 56.097.847.742,- (88,16%) dengan program antaran lain:

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Rehabilitasi Sosial



- 4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - 5) Program Pengendalian Penduduk
 - 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - 8) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 9) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 11) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 12) Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - 13) Program Perekonomian dan Pembangunan
- Beberapa Anggaran dan program yang mendukung Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan juga mendukung sasaran lain .

Sasaran 5 Menurunnya Angka Pengangguran

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2022	2021	2020	2019	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,40	5,19	104%	112%			
Rata-rata Capaian				104%	112%			

Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai target 5,40 dengan realisasi 5,19 dengan capaian 104%.

- Secara keseluruhan Tingkat Pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 adalah 6,49 %, dan ditingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 179.950 jiwa atau 6.52 %. Sedangkan ditingkat kota Pariaman pada tahun 2021 adalah 6,09%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran di Kota Pariaman adalah 5,73%, terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 0,36% (Sumber Data BPS Kota Pariaman) .

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.43
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2019-2022

KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Parsentase)			
	2019	2020	2021	2022
Kab.Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39
Kab.Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97	4,61
Kabupaten Solok	4,72	4,65	4,67	5,89
Kab. Sijunjung	3,64	5,30	3,57	4,87
Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,63	5,91
Kab. Padang Pariaman	6,05	8,13	8,41	6,60
Kab. Agam	4,78	4,61	5,06	4,93
Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25	3,72
Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92	5,36
Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71
Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,00	6,23
Kab .Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02	6,33
Kota Padang	8,74	13,64	13,37	11,69
Kota Solok	4,65	4,67	5,89	5,89
Kota Sawahlunto	6,84	8,20	6,38	5,00
Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90	4,84
Kota Bukittinggi	6,20	7,51	4,90	4,90
Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47	5,16
Kota Pariaman	5,48	5,71	6,09	5,19
Prov.Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

- Dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kota Pariaman berupaya untuk memperluas dan pengembangan kesempatan kerja. Namun demikian upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.
- Secara garis besar faktor yang mempengaruhi masalah ketenagakerjaan terutama tentang pengangguran di Kota Pariaman adalah faktor pendidikan, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dimana ketiga-



tiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Banyaknya pengangguran disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia, teknologi yang semakin canggih sehingga semakin sedikit kesempatan kerja yang ada. Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi pandemic covid 19, sehingga pelaku usaha banyak yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan tidak mampu untuk melanjutnya usaha tersebut.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Menurunnya Angka Pengangguran
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	-	-	5,43	5,10	-	-	6,09	5,19

Dari perbandingan realiasi dari sasaran Menurunnya angka Pengangguran dengan realisasi di tahun 2022 dengan angka 5,19 dibandingkan dengan akhir RPJMD terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,39. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Pariaman.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

Anggaran yang mendukung sasaran ini berkisar Rp. 111.409.500,- dengan realisasi Rp. 103.474.000,- (92,88%).



Sasaran 5 Meningkatnya Kemandirian Desa

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2022	2021	2020	2019
1	Indeks Desa Membangun	0,7710	0,7744	100,44%	101,15%	105,47%	105,11%
Rata-rata Capaian				100,44%	101,15%	105%	105%

Dari tabel sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Indeks Desa Membangun dengan target 0,7710 realisasi 0,7744 dengan capaian 100.4% .

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran status kemajuan desa yang diklasifikasikan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu Desa Mandiri, Desa maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Penentuan status kemajuan Desa ini, ditentukan oleh data komposit indikator Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor $\leq 0,4907 - 0,8155$ Indeks Desa Membangun. Nama-Nama dan Status Desa adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:



Tabel 3. 45
Nama –nama dan Status Desa Tahun 2021- 2022

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TAHUN 2022			NILAI IDM 2022	STATUS IDM TAHUN	
			IKS	IKE	IKL		2022	2021
1	PARIAMAN TENGAH	PAUH BARAT	0,8000	0,6670	0,9330	0,8000	Maju	Maju
2	PARIAMAN TENGAH	PAUH TIMUR	0,8340	0,6670	0,8670	0,7892	Maju	Maju
3	PARIAMAN TENGAH	RAWANG	0,8860	0,6830	0,8670	0,8119	Maju	Maju
4	PARIAMAN TENGAH	KAMPUNG BARU	0,9090	0,6830	0,9330	0,8417	Mandiri	Maju
5	PARIAMAN TENGAH	CIMPARUH	0,9200	0,6830	0,9330	0,8456	Mandiri	Maju
6	PARIAMAN TENGAH	JATI MUDI	0,7890	0,7170	0,9330	0,8129	Maju	Maju
7	PARIAMAN UTARA	AMPALU	0,7830	0,5333	1,0000	0,7721	Maju	Maju
8	PARIAMAN UTARA	APAR	0,6970	0,6330	0,9330	0,7546	Maju	Maju
9	PARIAMAN UTARA	TANJUNG SABAR	0,7260	0,6670	0,8670	0,7530	Maju	Maju
10	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	0,7771	0,5833	0,9333	0,7646	Maju	Maju
11	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK BARAT	0,8400	0,7000	1,0000	0,8467	Mandiri	Maju
12	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK TIMUR	0,7029	0,5833	0,8667	0,7176	Maju	Berkembang
13	PARIAMAN UTARA	MANGGUNG	0,8000	0,7167	0,9333	0,8167	Mandiri	Mandiri
14	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR UTARA	0,7940	0,6170	1,0000	0,8037	Maju	Maju
15	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL SELATAN	0,7090	0,6333	0,7333	0,6917	Berkembang	Berkembang
16	PARIAMAN UTARA	NARAS HILIR	0,8000	0,6830	0,6667	0,7167	Maju	Maju
17	PARIAMAN UTARA	NARAS 1	0,8000	0,7167	1,0000	0,8389	Mandiri	Mandiri
18	PARIAMAN UTARA	BALAI NARAS	0,8514	0,7000	0,9333	0,8283	Mandiri	Maju
19	PARIAMAN UTARA	PADANG BIRIK BIRIK	0,7429	0,6667	1,0000	0,8032	Maju	Maju
20	PARIAMAN UTARA	SINTUK	0,7771	0,5667	0,9333	0,7590	Maju	Maju
21	PARIAMAN UTARA	SUNGAI RAMBAI	0,6800	0,4333	1,0000	0,7044	Berkembang	Berkembang
22	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	0,7660	0,6000	0,6667	0,6775	Berkembang	Berkembang
23	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	0,8057	0,6333	0,9333	0,7908	Maju	Maju
24	PARIAMAN SELATAN	PASIR SUNUR	0,7829	0,5000	0,9333	0,7387	Maju	Maju
25	PARIAMAN SELATAN	BALAI KURAI TAJI	0,8229	0,7167	1,0000	0,8465	Mandiri	Maju
26	PARIAMAN SELATAN	PAUH KURAI TAJI	0,8686	0,6333	0,8667	0,7895	Maju	Maju



No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TAHUN 2022			NILAI IDM 2022	STATUS IDM TAHUN	
			IKS	IKE	IKL		2022	2021
27	PARIAMAN SELATAN	SIMPANG	0,8400	0,5333	0,8667	0,7467	Maju	Maju
28	PARIAMAN SELATAN	TOBOH PALABAH	0,8286	0,7167	0,8667	0,8040	Maju	Maju
29	PARIAMAN SELATAN	MARABAU	0,8057	0,6333	0,8667	0,7686	Maju	Maju
30	PARIAMAN SELATAN	BATANG TAJONGKEK	0,7657	0,5333	0,9333	0,7441	Maju	Maju
31	PARIAMAN SELATAN	SIKABU	0,8286	0,5500	0,8667	0,7484	Maju	Maju
32	PARIAMAN SELATAN	SUNGAI KASAI	0,8629	0,6000	0,8667	0,7765	Maju	Maju
33	PARIAMAN SELATAN	PALAK ANEH	0,7657	0,5333	0,9333	0,7441	Maju	Maju
34	PARIAMAN SELATAN	KAMPUNG APAR	0,7371	0,5833	0,9333	0,7513	Maju	Maju
35	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	0,8000	0,5667	0,9333	0,7667	Maju	Maju
36	PARIAMAN SELATAN	TALUK	0,8000	0,5833	0,9333	0,7722	Maju	Maju
37	PARIAMAN SELATAN	PADANG CAKUR	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	Maju	Maju
38	PARIAMAN SELATAN	PUNGGUNG LADING	0,7771	0,6000	0,8667	0,7479	Maju	Maju
39	PARIAMAN SELATAN	RAMBAI	0,7543	0,6667	0,8667	0,7625	Maju	Maju
40	PARIAMAN TIMUR	TALAGO SARIK	0,7600	0,6670	0,8670	0,7644	Maju	Maju
41	PARIAMAN TIMUR	PAKASAI	0,8400	0,7330	0,8670	0,8133	Maju	Maju
42	PARIAMAN TIMUR	KP. BARU PADUSUNAN	0,8630	0,5670	0,8670	0,7654	Maju	<i>Berkembang</i>
43	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG GADANG	0,8970	0,6500	0,9330	0,8268	Mandiri	<i>Maju</i>
44	PARIAMAN TIMUR	KOTO MARAPAK	0,8460	0,6170	0,8670	0,7763	Maju	Maju
45	PARIAMAN TIMUR	BATANG KABUNG	0,8510	0,6000	0,9330	0,7949	Maju	Maju
46	PARIAMAN TIMUR	BATO	0,8230	0,5500	0,8670	0,7465	Maju	Maju
47	PARIAMAN TIMUR	AIR SANTOK	0,8630	0,6330	0,8670	0,7876	Maju	Maju
48	PARIAMAN TIMUR	CUBADAK MENTAWAI	0,8000	0,6670	0,9330	0,8000	Maju	Maju
49	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI SIRAH	0,7200	0,6170	0,8670	0,7344	Maju	Maju
50	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI PASAK	0,7540	0,6000	0,8670	0,7403	Maju	<i>Berkembang</i>
51	PARIAMAN TIMUR	BUNGO TANJUNG	0,8860	0,7000	0,8670	0,8175	Mandiri	<i>Maju</i>
52	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG TANGAH	0,8290	0,6170	0,8670	0,7706	Maju	Maju
53	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG KANDANG	0,7260	0,5830	0,8670	0,7252	Maju	Maju
54	PARIAMAN TIMUR	KALUAT	0,8340	0,5670	0,8670	0,7559	Maju	Maju
55	PARIAMAN TIMUR	KAJAI	0,7830	0,6170	0,8670	0,7554	Maju	Maju
	Jumlah		0,8014	0,625	0,8970	0,7744		



Dari tahun 2020 – 2022 terjadi peningkatan Status Desa Berkembang naik menjadi Desa Maju, yang awalnya tahun 2020 Desa berkembang berjumlah 19 Desa, menjadi 6 Desa pada tahun 2021, tahun 2022 hanya tinggal 3.

Disamping itu padatahun 2020 belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri, sedangkan di tahun 2021 ada 2 Desa Mandiri, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 9 Desa Mandiri yang terdapat di:

1. Kecamatan Pariaman Tengah 2 Desa, yaitu Desa Kampung Baru dan desa Cimparuh;
2. Kecamatan Pariaman Utara 4 Desa, yaitu Desa Sikapak Barat, Desa Manggung, Desa Naras I dan Desa Balai Naras;
3. Kecamatan Pariaman Timur 2 Desa, yaitu Desa Kampung Gadang, dan Desa Bungo Tanjung; serta
4. Kecamatan Pariaman Selatan 1 Desa, yaitu Desa Balai Kurai Taji.

Peningkatan jumlah Status Desa mulai tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46
Status Desa di Kota Pariaman pada tahun 2020 -2022

NO	KECAMATAN	MANDIRI			MAJU			BERKEMBANG			TOTAL		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PARIAMAN TENGAH	0	0	2	4	6	4	2	0	0	6	6	6
2	PARIAMAN UTARA	0	2	4	11	11	10	6	4	3	17	17	17
3	PARIAMAN SELATAN	0	0	1	16	16	15	0	0	0	16	16	16
4	PARIAMAN TIMUR	0	0	2	5	14	14	11	2	0	16	16	16
Jumlah		0	2	9	36	47	43	19	6	3	55	55	55
Presentase		0	4%	16%	65%	85%	78%	35%	10,9%	5%	100%	100%	100%

Dilihat dari tabei di atas mulai tahun 2020 – 2022 terjadi peningkatan, yaitu

Terjadinya peningkatan status Desa di karenakan terpenuhinya nilai Indikator Desa yang sudah memiliki kemampuan mengelola daya dalam



ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan, yang di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Status Desa Maju Pada tahun 2020 berjumlah **36 Desa**, tahun 2021 bertambah **11 Desa** sehingga menjadi **47 Desa Maju**, sedangkan Tahun 2022 **berkurang menjadi 43 Desa karena adanya peningkatan status desa** yang tersebar di 4 Kecamatan, yaitu di Pariaman Tengah 4 Desa, Pariaman Utara 10 Desa, Pariaman Selatan 15 Desa dan Pariaman Timur 14 Desa.

Status Desa Berkembang tahun 2020 berjumlah **19 Desa**, tahun 2021 berkurang menjadi **6 Desa**, sedangkan Tahun 2022 **berkurang menjadi 3 Desa** yang terdapat di Kecamatan Pariaman Utara.

Di Provinsi Sumatera Barat, tahun 2022 status Desa Maju berjumlah 458 desa, naik dari tahun sebelumnya 399, begitu juga status Desa Mandiri tahun 2022 berjumlah 132 desa/nagari, dimana tahun 2021 hanya 76 desa/nagari.

Masih adanya desa/nagari dengan status Desa Tertinggal sebanyak 28 nagari, yaitu berada di Kabupaten Solok sebanyak 6 nagari, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 nagari, Padang Pariaman sebanyak 2 nagari, Limapuluh Kota sebanyak 1 nagari, Pasaman sebanyak 1 nagari, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 11 desa dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2 nagari.

Rata-rata nagari/desa tertinggal tersebut pada umumnya diakibatkan oleh tidak terpenuhinya indikator sarana kesehatan dan tenaga medis di desa/nagari tidak ada/kurang memadai.

Kemudian jarak tempuh sarana pendidikan dari pusat desa/nagari yang jauh, jumlah pusat pelatihan atau kursus di desa tidak tersedia, ruang terbuka untuk publik di desa/nagari tidak tersedia.

“Kemudian sarana air bersih di desa/nagari kurang memadai, jalan desa/nagari tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan lain-lain termasuk rawan terhadap bencana.



Lonjakan perkembangan desa/nagari merupakan dampak dari penyaluran Dana Desa,” dimana melalui Dana Desa juga telah meningkatkan kesempatan bagi desa/nagari untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakat yang ada.

Tabel 3.47
DATA KOMPOSIT INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
KOTA PARIAMANTAHUN 2019 - 2022

No	Indeks Desa Membangun(IDM)	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7230	0,7195	0,7606	0,814
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,5783	0,5730	0,59504	0.6249
3	Indeks Ketahanan Ekologi (IKL)	0,8703	1,6897	0,88851	0.8970

Sumber : Data Olahan Bag.Organisasi Setda Kota Pariaman Tahun 2022

Untuk meningkatkan Status Desa pada target 2023 maka sangat diperlukan kesinambungan program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang fokus kepada penguatan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan agar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman dapat kian ditingkatkan menuju Desa Maju.

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI			
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,0792	0,6850	0,6880	0,7400	0,7710	0,7200	0,7250	0,7485	0,7744

Program yang mendukung sasaran ini antara lain

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Administrasi Pemerintah Desa



- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran ini berjumlah Rp. 3.407.924.500,- dengan realisasi Rp. 3.272.196.955,- (96%)

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran pendapatan sebelum perubahan APBD tahun 2022 adalah 569.431.763.914,-
2. Jumlah Anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2022 adalah Rp. 580.175.055.183,-
3. Jumlah Anggaran belanja sebelum perubahan APBD tahun 2022 adalah Rp. 88.955.637.688,-
4. Jumlah Anggaran belanja setelah perubahan APBD tahun 2022 adalah Rp. 89.244.416.030,-
5. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2022 Rp. 30.000.000,--
6. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan tahun APBD 2022 Rp. 10.855.760.687,-
7. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2022 Rp. 0,-
8. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun 2022 Rp. 2.500.000.000,-
9. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018 s/d 2022.



TAHUN	PAD	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	36.781.361.440,51	6,29 (naik)	653.325.805.028,51	5,6%
2019	42.885.560.142,00	16,6%	698.660.608.548	6,1%
2020	54.783.919.177,00	27,7%	689.025.589.885	7,95%
2021	46.451.454.431,00	-15,21%	632.793.161.257	7,3%
2022	53.383.877.506,00	14,92%	633.558.932.689	8,4%

Dari tabel di atas dapat dilihat proporsi PAD terhadap pendapatan daerah di 2018 sebesar 5,6 %. Pada tahun 2019 proporsi PAD mengalami peningkatan sebesar 0,5 %, sehingga menjadi 6,1 %. Demikian juga pada tahun 2020 juga kembali mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dari tahun 2019 sehingga menjadi 7,95%. Dan tahun 2021 kembali turun 0,6% sehingga proporsi PAD terhadap Pendapatan menjadi 7,3%, sedangkan di tahun 2022 adanya kenaikan sebesar 1,1% sehingga menjadi 8,4% .

Sedangkan PAD dilihat penganggaran ditahun 2018 sebesar Rp. 36.781.361.440,51. Pada tahun 2019 penganggaran PAD naik sebesar 16,6 % dari tahun 2018, dan ditahun 2020 naik lagi 27,7%. Sedangkan ditahun 2021 turun 15,21%, dan ditahun 2022 kembali naik 14,92%.

Dana Perimbangan

TAHUN	DANA PERIMBANGAN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	525.650.863.678,00	4,3 % (turun)	653.325.805.028,51	80,46%
2019	544.751.976.000,00	3,63%	698.660.608.548,00	77,97%
2020	512.152.530.064,00	-5,98%	689.025.589.885,00	74,33%
2021	569.463.000.598,00	11,19%	632.793.161.257,00	89,99%
2022	573.196.410.228,00	0,66%	633.558.932.689,00	90,47%

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran dana perimbangan ditahun 2018 sebesar Rp. 525.650.863.678,00. Pada tahun 2019 penganggaran dana perimbangan naik sebesar 3,63 % dari tahun 2018. Dan ditahun 2020



penganggaran dana perimbangan turun 5,98% dari tahun 2019 di Tahun 2021 naik lagi sebesar 11,19%, dan di tahun 2022 naik 0,66%.

Sedangkan proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan pada tahun 2018 sebesar 80,45 , pada tahun 2019 proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan turun sebesar 2,48 dari tahun 2018 dan ditahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 3,64 % dari tahun 2019. Dan Tahun 2021 kembali naik sekitar 15,66% sehingga menjadi 89,99%, dan pada tahun 2022 naik lagi sebesar 90,48%.

10. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

TAHUN	DANA LAIN-LAIN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	15.801.577.910,00	81,43%	653.325.805.028,51	2,42%
2019	111.023.072.406,00	602,6%	698.660.608.548,00	15,89%
2020	122.089.140.644,00	9,97%	689.025.589.885,00	17,72%
2021	16.878.706.228,00	86,18%	632.793.161.257,00	2,67%
2022	6.978.644.955,00	-58,65%	633.558.932.689,00	1,10%

Dari tabel di atas dapat dilihat penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp. 15.801.577.910,00 . Pada tahun 2019 naik 602,6% dari tahun 2018, dan ditahun 2020 penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah, kembali naik 9.97 % dari tahun 2019. Dan didua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu di tahun 2021 turun 86,18% dan Tahun 2022 turun lago 58,65%.

Sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah terhadap pendapatan ditahun 2018 sebesar 2,42%. Pada tahun 2019 ini proporsi naik sebesar 13,4 % dari tahun 2018, yaitu 15,89%, dan ditahun 2020 juga naik sebesar 1,91 % yaitu 17,72%. Dan Tahun 2021 proporsi Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan kembali turun sebesar 15,05 menjadi 2,67%, sedangkan di Tahun 2022 hanya 1,10%.

11. Perkembangan Belanja Daerah



TAHUN	BELANJA				JUMLAH
	OPERASIONAL	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER	
2018	44.513.868.080,253	176.974.701.133,00	400.000.000,00	92.740.265.722,00	44.783.983.047.108
2019	484.802.521.538,93	171.955.619.758,10	200.000.000,00	95.977.582.121,00	752.935.723.418
2020	453.214.258.088,22	123.785.351.815,34	30.325.902.755,00	97.395.172.863,00	704.720.685.522
2021	496.726.974.674,78	79.451.123.876,44	930.625.970.,00	97.017.307.226,54	673.195.405.778
2022	485.996.752.332,00	67.187.610.014,00	500.000.000,00	88.230.331.030,00	641.914.693.376

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran belanja daerah tahun 2022 berjumlah Rp. 641.914.693.376,- mengalami penurunan sebesar Rp. 31.280.712.402 dari tahun 2021 dimana penganggaran belanja daerah berjumlah Rp. 673.195.405.778,-.

Untuk masing-masing kategori belanja dapat dijelaskan:

- belanja operasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 445.138.680.802,53,- ditahun 2019 mengalami peningkatan 8,9 % , sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,5 % dan ditahun 2021 kembali naik sebesar 9,06 % , dan di tahun 2022 turun sebesar 2,16%.
- Belanja Modal dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 176.974.701.133,00 ditahun 2019 turun sebesar 2,8 % , tahun 2020 kembali turun 28,01 , ditahun 2021 kembali turun 35,81%, dan di tahun 2022 kembali turun sebesar 15,44%.
- Sedangkan penganggaran belanja tak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00 , ditahun 2019 mengalami penurunan sekitar 50 % , dan ditahun 2020 melonjak naik sekitar 15.000 % namun ditahun 2021 kembali melonjak turun 96, 93 % , sedangkan di tahun 2022 kembali turun sebesar 46,28%.
- Belanja transfer pada tahun 2018 sebesar Rp. 92.740.265.722,00, untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan masing-masing 3,4% dan 14 % dan ditahun 2021 kembali turun sekitar 0,38 % , dan ditahun 2022 turun sebesar 9,06%.



12. Kondisi Pembiayaan Daerah

TAHUN	PENERIMAAN	NAIK/TURUN	PENGELUARAN	PROPORSI TERHADAP PEMBIAYAAN (%)
		(%)		
2018	63.727.842.629,02	17,44 (Turun)	1.800.000.000,00	2,9
2019	54.275.114.870,03	-17,42%	0,00	0,00%
2020	24.345.095.636,56	-122,94%	8.650.000.000	281,45%
2021	41.332.870.490,76	41,10%	0	0,00%
2022	10.855.760.687,00	-280,75%	2.500.000.000	434,23%

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada 2018 sebesar Rp. 63.727.842.629,02, Ditahun 2019 penerimaan pembiayaan ini juga turun sekitar 17,44 %. Dan diatahun 2020 kembali turun sebesar 55, 14 %. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada 2018 sebesar Rp. 1.800.000.000,- proporsi terhadap pembiayaan sebesar 2,9 %. Dan ditahun 2019 ini pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan proporsi. Kemudian ditahun 2020 ini pengeluaran pembiayaan Rp. 8.650.000.000,- dan proporsi terhadap pembiayaan sebesar 35,53 % dan proporsi terhadap pembiayaan sebesar 35,53 %. Ditahun 2021 pengeluaran pembiayaan kembali tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan proporsi. Namun ditahun 2022 kembali dianggarkan Rp. 2.500.000.000,-



13. Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	%
		(Rp)		
A	Pendapatan asli daerah	53.383.877.506,00	36.040.355.778,60	67,51%
	Pajak Daerah	11.110.000.000,00	11.833.954.381,00	106,52%
	Retribusi Daerah	20.252.367.276,00	8.436.954.597,00	41,66%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.972.938.163,00	8.984.132.635,00	100,12%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	12.775.572.067,00	6.785.314.165,60	53,11%
B	Pendapatan Transfer	573.196.410.228,00	565.414.887.553,00	98,64%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	536.726.653.000	530.083.292.774	98,76%
	Dana Perimbangan	488.268.602.000	481.625.241.774	98,64%
	Dana Insentif Daerah	8.914.775.000	8.914.775.000	100,00%
	Dana Desa	39.543.276.000	39.543.276.000	100,00%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.469.757.228	35.331.594.779	96,88%
	Pendapatan Bagi Hasil	36.469.757.228	35.331.594.779	96,88%
	DID	7,148,713,000.00	7,148,713,000.00	100
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6.978.644.955,00	5.387.575.614,00	78,22
	Pendapatan Hibah - LRA	2.500.000.000,00	1.479.000.000,00	78,22
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.478.644.955	3.908.575.614	101,2
	Jumlah Pendapatan daerah	633.558.932.689,00	606.842.818.945,60	96,91



Dari tabel diatas dapat dilihat semua jenis pendapatan tidak tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 67,51 %, dan dana perimbangan tercapai 98,64 %. Sementara dari lain –lain pendapatan daerah yang sah tercapai sebesar 77,20 % sehingga realisasi pendapatan daerah tercapai sebesar 95,78 %. Seperti dijelaskan diatas tidak tercapainya target PAD dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti belum stabilnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid -19 .

14. Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA OPERASI	485.996.752.332,00	458.234.277.899,00	94,29%
Belanja Pegawai	293.093.870.141,00	280.264.020.253,00	95,62%
Belanja barang jasa	187.853.577.191,00	173.967.527.796,00	92,61%
Belanja Hibah	3.471.785.000,00	3.382.929.850,00	97,44%
Belanja Bantuan Sosial	1.577.520.000,00	619.800.000,00	39,29%
BELANJA MODAL	67.187.610.014,00	61.316.158.584,57	91,26%
Belanja Modal tanah	3.000.000.000,00	2.727.000.000,00	90,90%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.016.909.074,00	10.610.882.799,75	88,30%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.802.587.500,00	9.410.579.598,00	87,11%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.484.670.576,00	36.971.655.692,82	93,64%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.883.442.864,00	1.596.040.494,00	84,74%
BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Tak terduga	500.000.000,00	0,00	0,00%
BELANJA TRANSFER	88.230.331.030,00	86.869.964.995,00	98,46%
Belanja Bagi Hasil	3.138.442.830,00	1.778.076.800,00	56,65%
Belanja Bantuan Keuangan	85.091.888.200,00	85.091.888.195,00	100,00%
Jumlah Belanja	641.914.693.376,00	606.420.401.478,57	94,47%



Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi belanja operasi tercapai sebesar 94,29,7% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan untuk belanja modal sebesar 91,26%, belanja tak terduga 0 % dan belanja transfer 98,46%. Jadi jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 606.420.401.478,57 (94,47%) dari total anggaran belanja Rp. 641.914.693.376,-



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang tersaji ini merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2022 yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD 2018-2023 Kota Pariaman.

Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman dimaksud, secara tahunan Pemerintah Kota Pariaman juga telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 .

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman berjumlah 19 sasaran yang diukur dengan 23 indikator kinerja sasaran.
2. Pada Misi I terdiri dari 1 sasaran, dan 1 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 52%.
3. Misi 2 terdapat 4 sasaran 5 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 110,9%.
4. Misi 3 terdapat 3 sasaran 5 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 91,93%.
5. Misi 4 terdapat 5 Sasaran 6 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 104,8 %.
6. Misi 5 terdapat 6 Sasaran 6 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 89.7%.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja selama tahun 2022 melalui indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dapat tercapai dengan baik, karena dari 23 Indikator, 11 indikator kinerja



mencapai $\geq 100\%$, 7 Indikator dengan capaian $\geq 90\%$, 3 indikator dengan capaian $\geq 80\%$, sedangkan 2 Indikator $\leq 66\%$.

Pencapaian di tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 walaupun proses dan mekanisme masih belum baik, dimulai dari proses perencanaan, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai.

Hal ini disebabkan karena Indikator Kinerja dalam proses pencapaian target dari beberapa sasaran tersebut tergantung pada OPD terkait dan formula penghitungan ada yang tidak jelas.

Disamping itu kualitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen Sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik .

Agar pencapaian indikator sasaran dan pencapaian target kinerja tahun kedepannya dapat lebih optimal, maka dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman 2018-2023 Sasaran dan indikator di RPJMD harus selaras dengan dokumen Renstra OPD, perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renja OPD, RKPD, Perencanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman serta PK OPD
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap triwulan oleh masing-masing OPD yang menjadi pelaksana tugas teknis.
3. mengidentifikasi permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan, jika muncul suatu permasalahan dapat segera terkoreksi dan diberikan langkah solusinya, agar dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.



4. seluruh Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman harus mempunyai kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan mengontrol kinerja jajaran dibawahnya .
5. Melakukan koordinasi yang baik dan intensif antar OPD, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Adapun Penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Pariaman tahun 2022 adalah :

1. Penghargaan Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia, Anugerah UI Green City Metric Rankings.

PENGUMUMAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH UI GREENCITYMETRIC RANKINGS 2022

KOTA PALING BERKELANJUTAN DI INDONESIA PERINGKAT 10 - 4

PERINGKAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
10	Kota Blitar	Jawa Timur
9	Kota Bontang	Kalimantan Timur
8	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan
7	Kota Surakarta	Jawa Tengah
6	Kota Pariaman	Sumatra Barat
5	Kota Parepare	Sulawesi Selatan
4	Kota Madiun	Jawa Timur

2. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia **Satyalancana Wira Karya**, bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan dari Presiden RI, Joko Widodo disematkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, pada peringatan puncak Hari Nusantara Tahun 2022, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12).



3. Ombudsman Republik Indonesia menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu kota yang masuk kedalam Zona Hijau dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022.



4. Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang diumumkan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).





5. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh Wakil Presiden Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian di Gedung Balai Sudirman Jakarta.



6. penghargaan sebagai kabupaten/kota bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Neglected Tropical Diseases (NTDs) atau Penyakit Tropis Terabaikan Sedunia .





7. Penghargaan Wiyata Dharma Pratama dari Menteri Pendidikan.

